



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018**

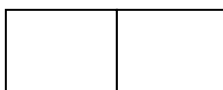


BUPATI SOLOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, diperlukan penyesuaian nomenklatur indikator sasaran, perubahan indikator kinerja sasaran, penyesuaian program, dan perubahan indikator sasaran program;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

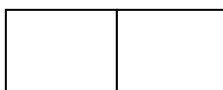
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Daerah, pemerintahan kecamatan dan nagari serta keterwakilan perempuan dan anak-anak dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari



sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

- 19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 - 20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 - 21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 - 22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 - 23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah dan

--	--

lintas Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.

3. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal2018

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

ASWIRMAN

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA
BARAT : 11/191/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN
2016-2021

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016



tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Perubahan pedoman penyusunan RPJMD dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebabkan adanya perubahan sistematika dan tahapan pada dokumen RPJMD. Selain itu, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian/perubahan yaitu :

1. Penyesuaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sesuai arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Penyesuaian nomenklatur indikator sasaran sesuai dengan istilah baku sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program yang mendukung;

--	--

4. Penyesuaian penempatan program berdasarkan indikator sasaran yang berubah;
5. Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan nomenklatur bidang di Perangkat Daerah;
6. Penghapusan program karena perubahan kewenangan; dan
7. Perubahan indikator kinerja program.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

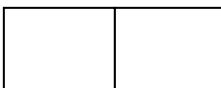
Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Perubahan pada Lampiran antara lain :

1. Penyesuaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sesuai arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Penyesuaian nomenklatur indikator sasaran sesuai dengan istilah baku sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
3. Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program yang mendukung;



4. Penyesuaian penempatan program berdasarkan indikator sasaran yang berubah;
5. Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan nomenklatur bidang di Perangkat Daerah;
6. Penghapusan program karena perubahan kewenangan; dan
7. Perubahan indikator kinerja program.

Pasal II

Cukup jelas

--	--

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	6
	1.4. Maksud dan Tujuan	12
	1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	14
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	16
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	21
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	28
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	69
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	73
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	73
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	81
	3.3. Kerangka Pendanaan	81
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	93
	4.1. Permasalahan Pembangunan	93
	4.2. Isu Strategis	95
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	101
	5.1. Visi	101
	5.2. Misi	103
	5.3. Tujuan dan Sasaran	106
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	111
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	128
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	170
BAB IX	PENUTUP	175

--	--

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

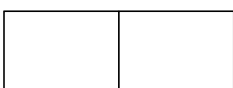
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mengacu dan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, karena sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa kepala daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menetapkannya. Untuk itu, Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih telah menyusun, menyampaikan, melakukan pembahasan dan menyepakati bersama DPRD dalam bentuk dokumen perencanaan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok



Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan kesinambungan dari periode Tahun 2010-2015.

Perubahan RPJMD dilakukan untuk penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok dengan kebijakan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional serta kebijakan perangkat daerah yang tertuang dalam kebijakan strategis. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok terhadap RPJMD Tahun 2016-2021, perubahan atas Dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dilakukan karena : 1). RPJMD yang ada saat ini baru mengakomodir sebatas urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan belum mencantumkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD yang sesuai dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 2). Adanya validasi data dari masing-masing Perangkat Daerah, target dan capaian Perangkat Daerah untuk tahun 2016-2021; 3). Adanya perubahan beberapa indikator sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati serta program yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016-2021.

Perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Solok dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah



pusat. Perubahan ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) yang menegaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : 1). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan; dan 3) Terjadi perubahan yang mendasar;

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4936/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019 bertujuan untuk : a). mewujudkan keselarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun 2015-2019; b). mewujudkan keselarasan antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN tahun 2015-2019; c). mewujudkan dukungan dan peran pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015-2019, dan d). mewujudkan koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu didalamnya juga diatur mengenai upaya penyelarasan antara Gubernur atau Bupati yang dilantik pada saat atau sebelum 2015 dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menjadi dasar kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Solok pada bulan September 2017 tentang perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sesuai dengan hal diatas. Kesepakatan masih ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di saat yang bersamaan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tersebut berimplikasi terhadap sistematika dan tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Pada masa transisi ini, sebagian tahapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 masih tetap dilakukan diantaranya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan perubahan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 pada bulan November 2017.

Penyempurnaan perubahan RPJMD terus dilakukan hingga *coaching clinic* RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah pada bulan Februari tahun 2018 dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 masih terdapat beberapa Indikator yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Bupati melainkan kepala Perangkat daerah, sehingga indikator pada RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 dan renstra Perangkat Daerah perlu disesuaikan.

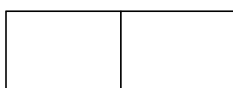
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

--	--

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

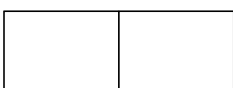
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah urusan yang bersifat konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah

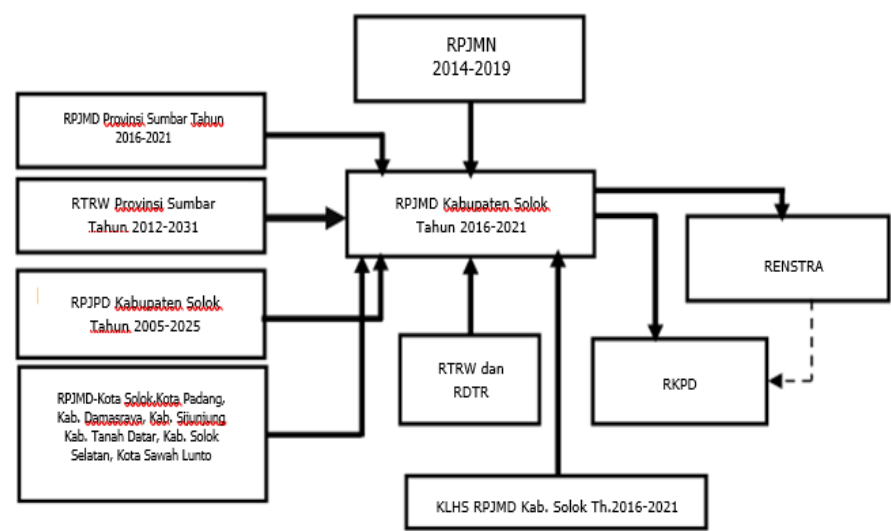


pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut, maka sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kedua urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi dasar kewenangan otonomi bagi pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan atau penugasan dari pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip kewenangan otonomi tersebut, maka menjadi bahan dan pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Agar RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan pemerintah provinsi maka perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, waktu, ruang, dan fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Solok dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Hubungan antar dokumen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan daerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 telah berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJM Nasional 2014-2019.

2. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJPD Kabupaten Solok

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program

--	--

jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, arah dan kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD yang mencakup tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

3. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD, dimaknai perlunya keserasian dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah Provinsi. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi tentu lokusnya berada pada Daerah Kabupaten/Kota, di samping itu pelaksanaan asas dekonsentrasi berada di tingkat provinsi sebagai konsekuensi dari Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dibarengi pula dengan kewenangan otonomi yang bersifat konkuren. Secara eksternalitas hubungan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi semakin kuat dan harus bersinergi antara pola perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi. Sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Solok dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasinya akan saling mendukung dan mengisi serta memperkuat hubungan kabupaten dengan provinsi yang pada gilirannya keberhasilan pembangunan Kabupaten Solok juga merupakan keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

4. RPJMD Kabupaten Solok dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis

--	--

RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Solok.

5. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

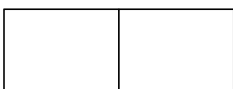
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Solok yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJM Nasional. Berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

6. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok berpedoman pada RTRW Kabupaten Solok dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang

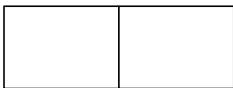


Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok tersebut, Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Solok meliputi:

- a. Pengembangan organisasi ruang yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten Solok;
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang mengintegrasikan seluruh pusat kegiatan wilayah Kabupaten Solok dan memberikan layanan sebesar-besarnya bagi permukiman yang ada pada wilayah Kabupaten Solok;
- c. Pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung sesuai kewenangan daerah;
- d. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;



- e. Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

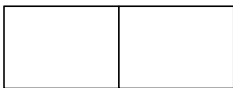
7. RPJMD Kabupaten Solok dengan Perencanaan Lainnya

Dalam menyusun RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RPJMD Kota Solok, Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan abupaten Damasraya yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Hal ini bertujuan agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Secara terperinci hubungan antar dokumen dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Solok sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan tahun 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola rencana dan pola pelaksanaan.



1.4 Tujuan

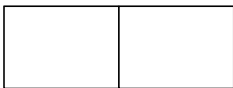
Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 2016-2021 agar ada kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan daerah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat dan *stakeholders* (pemangku kepentingan) lainnya;
2. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN tahun 2015-2019;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Solok untuk tahun 2016-2021.

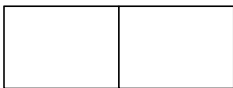
1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- Memuat secara logis dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah



BAB III	<p>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>Memuat gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab.</p>
BAB IV	<p>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</p> <p>Memuat berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.</p>
BAB V	<p>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</p> <p>Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.</p>
BAB VI	<p>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Memuat dan menjelaskan strategi, arah kebijakan dan program dari setiap strategi dipilih.</p>
BAB VII	<p>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</p> <p>Dalam bagian ini diuraikan tentang kerangka pendanaan pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai perangkat daerah penanggung jawab program selama 5 (lima) tahun.</p>
BAB VIII	<p>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator <i>outcome</i> program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih</p>



indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB IX PENUTUP

--	--

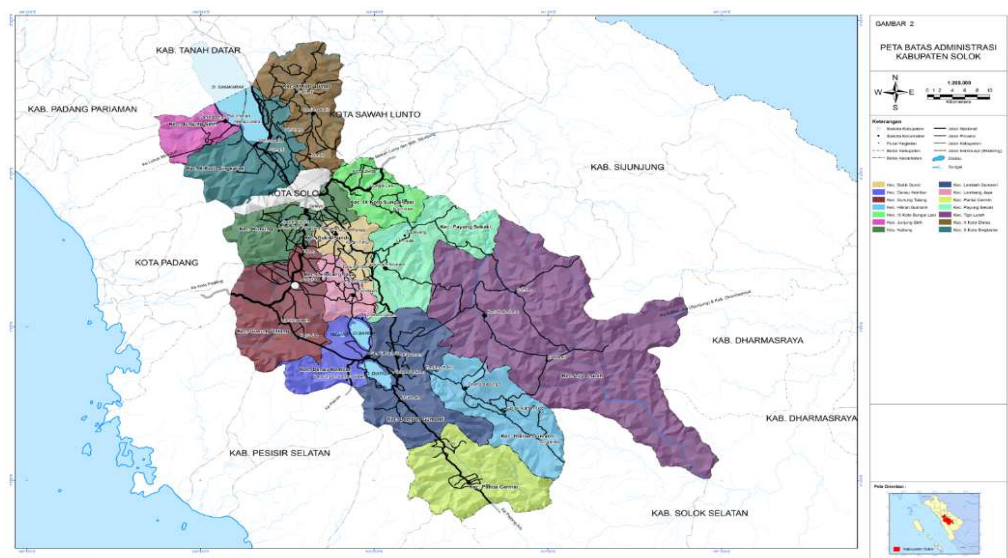
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Secara geografis Kabupaten Solok berada pada posisi 01°20'27" -01°21'39" Lintang Selatan, 100°25'00" - 100°33'43" Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738.00 Km²) dengan batas-batas wilayah yakni : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Peta administratif Kabupaten Solok dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Solok



Sumber : RTRW Kabupaten Solok Tahun 2014

Secara administratif Kabupaten Solok terbagi dalam 14 kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari paling sedikit terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki 2 nagari. Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto

--	--

Diatas dengan jumlah 52 jorong dan kecamatan yang memiliki jorong paling sedikit adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Junjung Sirih dengan jumlah masing-masing 11 jorong. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah kecamatan Tigo Lurah dengan luas 57.500 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.600 Ha, untuk lebih jelasnya tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Nagari, Jorong dan Luas Wilayah Per-Kecamatan
di Kabupaten Solok

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	NAGARI	JORONG	LUAS DAERAH (HA)
1.	Pantai Cermin	S u r i a n	2	28	36.600
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	43.900
3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	28.400
4.	Payung Sekaki	Kubang Nan Duo	3	11	39.200
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	57.500
6.	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43	9.400
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	7.600
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	38.500
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	10.900
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	17.100
11.	Kubung	Selayo	8	37	19.200
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	25.113
13.	Junjung Sirih	Panninggahan	2	11	14.687
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	25.700
	TOTAL		74	414	373.800

Sumber : Keputusan Bupati Solok Nomor 100-592-2012

2.1.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2015 berjumlah 363.684 jiwa atau naik sebesar 0,07% dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Solok Tahun 2014 yakni sebanyak 361.095 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk Kabupaten Solok terdiri dari 179.721 laki-laki dan 183.963 perempuan. Seperti halnya di wilayah lain di Sumatera Barat, penduduk laki-laki di Kabupaten Solok lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. *Sex ratio* penduduk Kabupaten Solok sebesar 98. Kecamatan Kubung memiliki proporsi jumlah penduduk yang paling besar yakni sebanyak 16,13 % atau 58.678 jiwa disusul Kecamatan Lembah Gumanti dengan proporsi sebesar

--	--

15,78% atau 57.392 jiwa. Kecamatan Payung Sekaki menjadi kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk paling kecil yakni 8.302 jiwa atau 2,28%. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Solok menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Solok pada Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
1.	Pantai Cermin	10.241	10.600	20.841	97
2.	Lembah Gumanti	28.848	28.544	57.392	101
3.	Hiliran Gumanti	8.474	8.364	16.838	101
4.	Payung Sekaki	4.174	4.128	8.302	101
5.	Tigo Lurah	4.988	5.077	10.065	98
6.	Lembang Jaya	13.319	13.501	26.820	99
7.	Danau Kembar	9.852	9.871	19.723	100
8.	Gunung Talang	24.569	24.917	49.486	99
9.	Bukit Sundi	11.391	12.205	23.596	93
10.	IX Koto Sei. Lasi	4.874	4.873	9.747	100
11.	Kubung	29.041	29.638	58.678	98
12.	X Koto Diatas	8.579	9.384	17.963	91
13.	X Koto Singkarak	15.654	16.559	32.213	95
14.	Junjung Sirih	5.717	6.302	12.019	91
	JUMLAH	179.721	183.963	363.684	98

Sumber : BPS Kabupaten Solok tahun 2016

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2015 sebesar 97,29 jiwa/KM². Dengan kepadatan sebesar 97,29 jiwa/KM², artinya secara rata-rata setiap satu kilo meter persegi wilayah Kabupaten Solok ditempati oleh sekitar 98 jiwa. Kecamatan Kubung menjadi kecamatan dengan penduduk yang paling padat yakni 305,61 jiwa/KM² atau terdapat sekitar 306 jiwa penduduk dalam setiap KM² wilayah Kecamatan Kubung. Dengan luas wilayah yang paling besar, Kecamatan Tigo Lurah mempunyai kepadatan penduduk yang paling kecil yakni sebesar 16,71 jiwa/KM². Kepadatan penduduk Kabupaten Solok, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

--	--

Tabel 2.3
Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Per Kecamatan
Pada Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH (Km2)	PENDUDUK	KEPADATAN
1.	Pantai Cermin	366,00	20.841	56,94
2.	Lembah Gumanti	459,72	57.392	124,84
3.	Hiliran Gumanti	263,28	16.838	63,95
4.	Payung Sekaki	364,50	8.302	22,78
5.	Tigo Lurah	602,50	10.065	16,71
6.	Lembang Jaya	99,90	26.820	268,47
7.	Danau Kembar	70,10	19.723	281,36
8.	Gunung Talang	385,00	49.486	128,54
9.	Bukit Sundi	109,00	23.596	216,48
10.	IX Koto Sungai Lasi	171,00	9.747	57,00
11.	Kubung	192,00	58.678	305,61
12.	X Koto Diatas	257,00	17.963	69,89
13.	X Koto Singkarak	295,50	32.213	109,01
14	Junjung Sirih	102,50	12.019	117,26
	JUMLAH	3.738,00	363.684	97,29

Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2016

Jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun merupakan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Solok dengan jumlah penduduk sebanyak 39.246 atau 10,79 persen orang dan diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 38.971 orang atau 10,72 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kabupaten Solok dalam menentukan prioritas pembangunan dalam bidang sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Selanjutnya untuk melihat data selengkapnya tentang jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.4.

--	--

Tabel 2.4
Banyaknya Penduduk Kabupaten Solok Menurut Jenis Kelamin
dan Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	19.985	19.261	39.246
5 – 9	19.777	19.194	38.971
10 – 14	18.405	17.795	36.200
15 – 19	16.525	15.972	32.497
20 – 24	13.498	13.297	26.795
25 – 29	14.427	13.945	28.372
30 – 34	12.532	12.980	25.512
35 – 39	11.860	12.246	24.106
40 – 44	10.688	11.422	22.110
45 – 49	9.975	10.798	20.773
50 – 54	9.199	10.053	19.252
55 – 59	8.414	8.847	17.261
60 – 64	5.745	5.930	11.675
65 – 69	3.479	4.122	7.601
70 – 74	2.574	3.451	6.025
74 +	2.638	4.650	7.288
Jumlah	179.721	183.963	363.684

Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2016

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 yang tercatat 1,19 persen menjadi 0,72 persen pada tahun 2015, angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan penduduk provinsi Sumatera Barat yang tahun 2011 dan tahun 2015 tercatat masing-masing 1,4 persen dan 1,26 persen. Hal ini dapat menjadi cerminan keberhasilan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana di Kabupaten Solok. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kabupaten Solok selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kab. Solok
Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan	Luas (Km2)	Kepadatan
2011	352.705	1,19	3.738	94,36
2012	355.077	0,67	3.738	94,99
2013	358.383	0,93	3.738	95,88
2014	361.095	0,76	3.738	96,60
2015	363.684	0,72	3.738	97,29

Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2016

--	--

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang sering digunakan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak enam tahun terakhir terjadi peningkatan IPM dari 64,53 pada tahun 2010 menjadi 67,12 pada tahun 2015 yang dapat menjadi indikasi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan komponen IPM Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

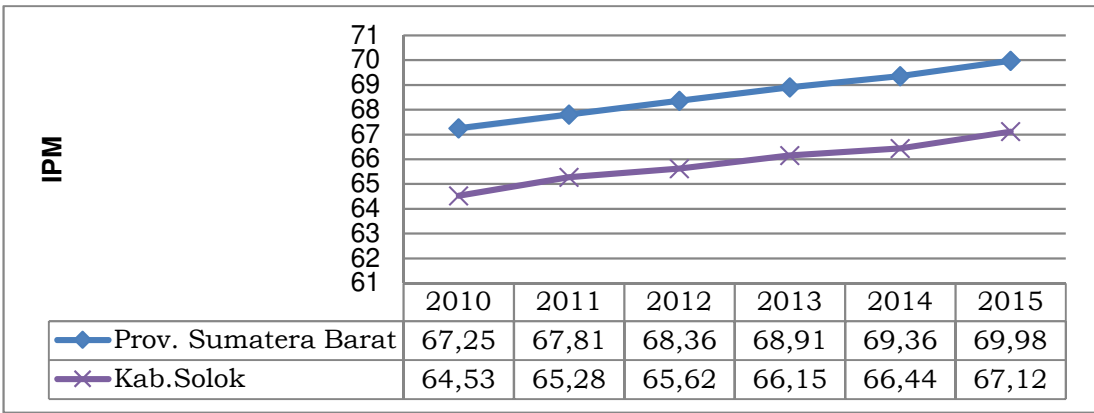
No	Komponen IPM	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,60	66,70	66,80	66,90	66,95	67,35
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,90	12,34	12,38	12,41	12,53	12,88
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,16	7,30	7,44	7,53	7,56	7,57
4	Pengeluaran Perkapita (Rp Ribu)	Org/thn	8.690	8.754	8.824	9.118	9.228	9.334
IPM Kabupaten Solok		Indeks	64,53	65,28	65,62	66,15	66,44	67,12

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat Tahun 2015

Namun demikian, perkembangan IPM Kabupaten Solok sampai tahun 2015 masih dibawah rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan berada pada posisi 14 dari 19 kab/kota di Sumatera Barat. Perbandingan lebih lanjut terlihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Solok dan Sumatera Barat Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016 (diolah)

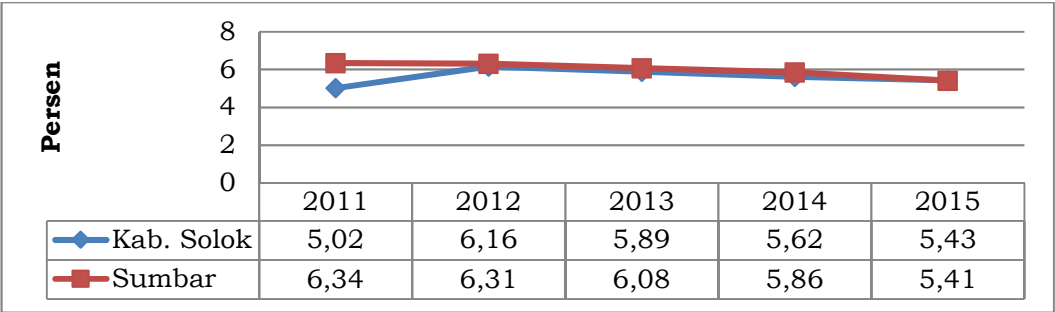
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana tahun 2015 tercatat sebesar 5,43 persen yang menurun dari tahun

--	--

sebelumnya 5,62 persen, namun angka pertumbuhan 2015 tersebut sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,41 persen. Hal ini terjadi akibat melemahnya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional dan regional. Pada Grafik 2.2 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dibanding Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Solok dan Sumatera Barat Tahun 2011-2015



Sumber : Sumatera Barat Dalam angka 2015-2016 (diolah)

2.2.2. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita yang diperoleh dari hasil bagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun berkenaan. Pada Tabel 2.7 dibawah ini tergambar bahwa pendapatan perkapita Kabupaten Solok mengalami kenaikan dari 19,47 juta rupiah pada Tahun 2011 menjadi 27,84 juta tahun 2015, namun angka tersebut masih dibawah PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat yang tercatat tahun 2015 sebesar 34,41 juta rupiah.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Solok
Tahun 2011-2015 (Rp Juta)

No	PDRB Perkapita	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kabupaten Solok	19,47	21,48	23,72	26,03	27,84
2	Sumatera Barat	24,06	26,29	28,99	32,13	34,41

Sumber : BPS Kab. Solok Tahun 2016

Struktur perekonomian Kabupaten Solok menurut lapangan usaha tahun 2015 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar

--	--

38,81 persen, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,99 persen serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,37 persen.

Tabel 2.8
Struktur Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Solok
Tahun 2012-2015 (%)

Kode	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40,77	39,91	39,49	38,81
B	Pertambangan dan Penggalian	5,67	5,74	5,78	5,60
C	Industri Pengolahan	5,73	5,78	5,81	5,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	7,49	7,91	7,94	8,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	10,24	10,32	10,37
H	Transportasi dan Pergudangan	11,13	10,69	10,68	10,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,71	0,70	0,69	0,70
J	Informasi dan Komunikasi	5,51	5,85	6,18	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,82	1,78	1,74
L	Real Estat	0,80	0,80	0,80	0,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,53	5,46	5,46
P	Jasa Pendidikan	2,64	2,72	2,77	2,86
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1,17	1,21	1,22	1,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,91	0,91	0,90	0,88

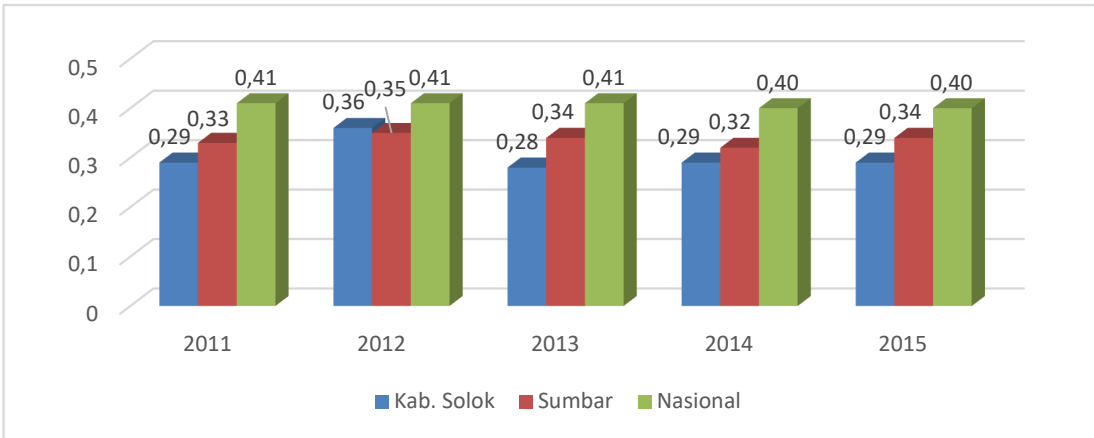
Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2016

2.2.3. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan digambarkan oleh indikator Gini Ratio (indeks gini) yang angkanya berkisar antar 0 hingga 1. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang mempunyai pendapatan yang sama, sedangkan indeks gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna atau 1 persen penduduk memiliki 99 persen kekayaan suatu daerah/negara. Indeks gini di Kabupaten Solok selama 5 tahun terakhir relatif menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan, seperti tersaji pada grafik berikut :

--	--

Grafik 2.3
Indeks Gini Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2011-2015

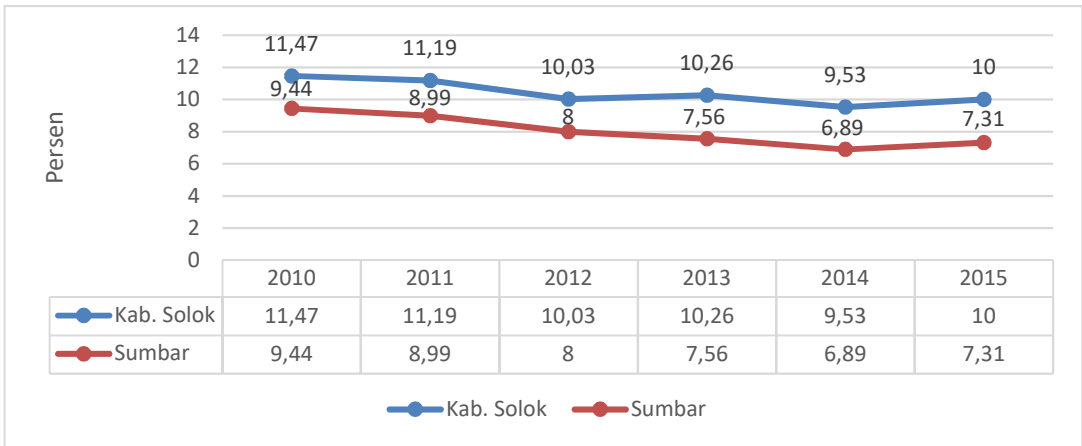


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

2.2.4. Kemiskinan

Kemiskinan diukur berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok tahun 2015 sebanyak 36.420 jiwa atau 10 persen, angka ini meningkat dari tahun 2014 yang tercatat sebesar 9,53 persen. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Solok dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016

--	--

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok dari tahun 2010 kecenderungannya menurun, meskipun tahun 2013 mengalami kenaikan. Angka kemiskinan di Kabupaten Solok masih berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 7,31 persen.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Data pada Tabel 2.9 dibawah ini dapat menggambarkan kondisi kemiskinan kurun waktu 5 tahun terakhir, penduduk di atas garis kemiskinan semakin meningkat walaupun sempat turun pada Tahun 2013. Dengan semakin meningkatnya penduduk yang berada di atas garis kemiskinan menandakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan. Berdasarkan indikator *Poverty Gap Index/P₁* dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014, penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan *Poverty Severity Index/P₂* mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indikator kemiskinan Kabupaten Solok dari Tahun 2010 s/d 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Kemiskinan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,25	88,80	89,95	89,70	90,45	89,99
2	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	265.342	279.674	296.812	316.756	329.385	345.955
3	Poverty Gap Index/P ₁ (%)	1,80	1,62	1,09	1,37	0,80	0,02
4	Poverty Severity Index/P ₂ (%)	0,41	0,37	0,22	0,29	0,14	0,09
5	Persentase Penduduk Miskin / Po	11,47	11,19	10,03	10,26	9,53	10,00

Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2016

--	--

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja urusan kesehatan ditunjukkan oleh indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, dan Persentase Balita Gizi Buruk. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kelangsungan hidup bayi (orang)	988,04	991,93	986,72	985,74	982,63	983,53
2	Angka usia harapan hidup (Tahun)	66,60	66,70	66,80	66,90	66,95	67,35
3	Persentase balita gizi buruk	0,031	0,036	0,044	0,048	0,027	0,024

Sumber : Dinas Kesehatan

Pada bidang kesehatan dapat dilihat bahwa angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mencapai umur 67,35 tahun. Angka usia harapan hidup ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, ini menandakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Solok meningkat dari waktu ke waktu selama lima tahun terakhir. Namun, capaian ini masih berada di bawah capaian usia harapan hidup provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu sebesar 68, 66 Tahun.

Kemudian jika dilihat dari indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, perkembangan indikator ini dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 terus mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2014 angka ini menjadi sebesar 982,63. Angka 982,63 menunjukkan bahwa dari 1.000 bayi yang lahir 982,63 orang hidup dan 17,37 bayi meninggal. Angka Kelangsungan Hidup Bayi yang terus mengalami penurunan ini sama artinya dengan semakin tingginya Angka Kematian Bayi. Kondisi ini pada Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sehingga mencapai angka sebesar 983,53, dengan meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi berarti Angka Kematian Bayi justru mengalami penurunan. Sedangkan angka persentase balita gizi buruk mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 menjadi sebesar 0,024% dengan jumlah balita gizi buruk berkurang dari 10 pada Tahun 2014 menjadi 9 pada Tahun 2015.

--	--

2.2.5. Kebudayaan

Analisis kinerja seni dan budaya dapat dilihat pada indikator jumlah grup kesenian. Perkembangan terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kebudayaan di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	160	165	170	175	177	177
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	6	6	6	6	6	5
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	3	2	2	2
4	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	64	65,71	71,43	85,71	89,19	94,59

Sumber : Disdikpora dan Disbudpar Tahun 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja di bidang kebudayaan dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung kelestarian budaya di Kabupaten Solok antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Kinerja di bidang ini dapat dilihat dari persentase pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada Tahun 2015 yang mencapai 94,59 persen. Sementara itu jumlah grup kesenian dan penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak mengalami peningkatan, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penurunan dari tahun 2014.

2.2.5 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga merupakan faktor yang cukup strategis untuk membentuk karakter generasi muda dan menciptakan generasi yang produktif dan berprestasi. Perkembangan indikator kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada Tabel 2.12.

--	--

Tabel 2.12
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kepemudaan dan
Olahraga di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Klub Olah Raga	25	25	25	98	98	98
2	Jumlah Gedung Olah Raga	14	14	14	63	63	54
3	Jumlah Organisasi Olah Raga	25	25	25	25	25	32
4	Jumlah Kegiatan Olah Raga	22	22	22	26	28	26
5	Jumlah Lapangan Olah Raga	196	196	196	563	563	481
6	Jumlah Organisasi Pemuda	51	51	51	51	51	18
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2	10	10	12

Sumber : Disdikpora dan Disbudpar Tahun 2016

Berdasarkan data sebagaimana dilihat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan olah raga di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh turunnya jumlah gedung olah raga dan lapangan olah raga. Hal yang sama juga terjadi dengan indikator kinerja pemuda yang ditunjukkan dengan turunnya jumlah organisasi pemuda sedangkan kegiatan kepemudaan mengalami peningkatan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Analisis kinerja urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dari aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Pada Aspek kesejahteraan masyarakat kinerja urusan pendidikan, indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan upaya pembangunan adalah angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi murni.

Perkembangan indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni di Kabupaten Solok dapat dilihat dari Tabel 2.13.

--	--

Tabel 2.13
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Kasar (%) :						
	- APK SD/MI/Paket A	113,46	109,58	121,39	108,71	115,12	110,95
	- APK SMP/MTs/Paket B	84,02	82,11	83,27	83,71	93,86	93,25
	- APK SMA/SMK/MA/Paket C	50,88	56,11	54,96	56,83	55,27	59,16
2	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%) :						
	- APT SD/MI/Paket A	28,17	26,24	25,40	28,50	29,29	28,49
	- APT SMP/MTs/Paket B	16,47	15,56	16,68	17,37	17,37	17,37
	- APT SMA/SMK/MA/ Paket C	14,29	12,87	13,72	14,37	14,37	12,37
3	Angka Partisipasi Murni (%) :						
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,76	94,25	94,61	93,12	98,67	94,99
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65,13	61,44	62,31	65,44	73,83	72,92
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	36,18	45,57	43,98	46,48	41,52	48,44

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016

Pada Tahun 2015, APK pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014 walaupun mengalami turun pada Tahun 2013, sedangkan APK pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan APK pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat justru mengalami penurunan dibanding capaian pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2015, seperti halnya Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar atau sederajat dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP atau sederajat mengalami penurunan dari capaian pada Tahun 2014, namun Angka Partisipasi Murni (APM) SMA atau sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014.

Berdasarkan perkembangan APK dan APM selama 5 tahun terakhir dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan SD atau sederajat dan pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat sangat baik. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih kurang, kondisi ini diantaranya disebabkan oleh banyaknya masyarakat Kabupaten Solok mengirim anaknya untuk bersekolah di luar Kabupaten Solok seperti ke Kota Solok, Kota

--	--

Padang, Kota Padang Panjang dan lain-lain. Dari data-data tersebut juga dapat dilihat bahwa APK maupun APM ditingkat pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan APK dan APM ditingkat pendidikan SLTP dan SLTA, hal ini merupakan dampak adanya program wajib belajar 9 Tahun.

Selanjutnya indikator urusan pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT). Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada jenjang pendidikan SD atau sederajat mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014. Sedangkan APT pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat tidak mengalami perubahan dan APT pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014.

Pada aspek pelayanan umum kinerja urusan pendidikan ditunjukkan oleh indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio guru terhadap murid, sarana pendidikan dengan kondisi baik, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan dan kualifikasi guru. Perkembangan indikator Angka Partisipasi Sekolah yang menunjukkan perbandingan jumlah anak yang sekolah dengan jumlah anak usia sekolah, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dan rasio guru terhadap murid pada bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	102,15	92,49	94,33	94,94	98,45	97,03
2	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah: - SD/MI - SMP/MTs	1:139 1: 235	1:159 1:232	1:158 1:229	1:161 1:234	1:148 1:211	1:131 1:210
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1:15	1:13	1:14	1:14	1:13	1:13
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata	1:15	1:13	1:14	1:14	1:13	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2016

--	--

Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah dapat dilihat bahwa dari tahun 2011- 2014 angka ini mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,98% namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung sekolah mengalami penurunan. Penurunan ini juga ditunjukkan oleh rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah yang juga mengalami sedikit penurunan. Sedangkan perkembangan rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2014 dan tahun 2015 nilainya tetap.

Selanjutnya pada pendidikan menengah, perkembangan Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru terhadap Murid terlihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Perkembangan Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan
Menengah Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	54,34	54,34	55,49	58,44	58,99	57,30
2	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	1:463	1:478	1:460	1:450	1:453	1:435
3	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2016

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dilihat bahwa perkembangan Angka Partisipasi Sekolah dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan namun pada Tahun 2015 angka ini mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi sebesar 57,30%. Seperti halnya Angka Partisipasi Sekolah pada pendidikan dasar, maka penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada pendidikan menengah ini menunjukkan adanya sedikit penurunan daya tampung sekolah. Sedangkan jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, indikator ini menunjukkan tidak adanya perkembangan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014.

Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Solok selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi bangunan sekolah di

--	--

seluruh jenjang pendidikan agar layak pakai. Tabel 2.16 berikut menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Solok.

Tabel 2.16
Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	58,37	67,12	68,68	69,34	70,76	83,82
2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	77,73	75,25	75,42	75,49	75,35	76,91
3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)		94,57	94,90	95,59	95,64	92,58

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi bangunan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi baik terus mengalami kenaikan dengan angka rata-rata sebesar 4,17% begitu juga dengan kondisi bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,41%. Sedangkan kondisi bangunan sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dari Tahun 2011-2014 terus mengalami kenaikan namun capaian pada Tahun 2015 mengalami penurunan dengan angka yang hanya tercapai 92,58%. Belum maksimalnya peningkatan kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Solok yang dalam keadaan baik disebabkan oleh alokasi dana untuk merehabilitasi dan membangun gedung sekolah yang terbatas sedangkan bangunan sekolah yang harus diperbaiki sangat banyak. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah tersebut sangat tergantung kepada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok maka berbagai kegiatan telah dilakukan sehingga APK PAUD dari tahun 2011 sampai Tahun 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

--	--

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah siswa seluruhnya pada jenjang TK/RA/TPA/PAUD	7.570	9.790	12.217	14.851	14.974	17.743
2	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	22.117	23.592	22.391	23.885	23.885	23.587
3	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	19,11	21,31	45,37	62,18	65,50	75,22

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2016

Selanjutnya indikator kinerja urusan pendidikan pada aspek pelayanan umum juga ditunjukkan oleh indikator Angka Putus Sekolah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,42	0,28	0,27	0,21	0,57	0,25
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,01	0,18	0,16	0,15	0,23	0,15
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,47	0,08	0,06	0,05	0,70	0,29

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, baik ditingkat SD atau sederajat, SMP atau sederajat, maupun SMA atau sederajat, indikator Angka Putus Sekolah di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan. Namun pada Tahun 2014 Angka Putus Sekolah disemua jenjang pendidikan justru mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok sehingga beberapa kegiatan telah dilakukan sehingga angka ini pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Berikutnya adalah indikator angka kelulusan dan angka melanjutkan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

--	--

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99,56	99,89	99,99	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	96,70	93,35	96,67	99,24	99,35	99,92
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	92,05	98,03	98,93	99,12	99,06	99,94
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,31	98,42	86,29	84,77	89,07	89,69
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	88,85	59,86	68,40	70,83	64,04	65,08

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2016

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan untuk semua jenjang pendidikan selama 5 tahun terakhir cukup menggembirakan yaitu hampir semuanya mempunyai nilai di atas 95%. Angka Kelulusan pada tingkat SD atau Sederajat dan SMP atau sederajat terus mengalami kenaikan bahkan mulai tahun 2014 Angka Kelulusan pada tingkat SD atau Sederajat telah mencapai 100%. Sedangkan ditingkat SMA atau sederajat Angka Kelulusan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2014 menurun menjadi 99,06 dan kemudian dengan berbagai upaya yang telah dilakukan maka pada tahun 2015 kembali naik menjadi 99,94%%.

Sementara indikator angka melanjutkan baik dari tingkat SD atau sederajat ke tingkat SMP atau sederajat maupun dari tingkat SMP atau sederajat ke tingkat SMA atau sederajat mengalami fluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014, angka melanjutkan dari tingkat SD atau sederajat ke tingkat SMP atau sederajat pada Tahun 2015 hanya mengalami sedikit kenaikan begitu juga dengan angka melanjutkan dari SMP atau sederajat ke SMA atau sederajat.

Rendahnya Angka melanjutkan dari SMP atau sederajat ke SMA atau sederajat ini memberikan kontribusi terhadap rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Solok yaitu hanya sebesar 7,57 tahun pada tahun 2015.

--	--

Indikator lain yang tak kalah pentingnya untuk melihat kinerja urusan pendidikan pada Aspek Pelayanan Umum adalah kualitas guru sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Perkembangan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 Atau D-IV
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru SD/MI Yang Memiliki Ijazah S1/D4 (%)	32,48	34,60	43,36	61,49	74,02	91,44
2	Guru SMP/MTs Yang Memiliki Ijazah S1/D4 (%)	69,36	67,41	80,32	83,85	88,33	90,85
3	Guru SMA/MA/SMK Yang Memiliki Ijazah S1/D4 (%)	93,37	96,42	96,68	97,61	95,22	97,63

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2016

Upaya untuk meningkatkan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV terus diupayakan antara lain dengan memberikan bantuan biaya untuk melanjutkan studi bagi guru-guru yang belum S1/D-IV dan memberikan kemudahan untuk izin belajar dari pihak terkait serta adanya kebijakan nasional untuk standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya tersebut cukup berhasil hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV terutama untuk guru SD. Guru SD atau MI mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 34,60% pada tahun 2011 menjadi 91,44% pada Tahun 2015.

Begitu juga dengan Guru SMP/MTs dimana pada tahun 2011 jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV hanya sebesar 67,41% menjadi sebesar 90,85% pada tahun 2015. Sedangkan perkembangan jumlah Guru SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1/D-IV sangat lambat dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bahkan mengalami penurunan pada Tahun 2014.

Selain meningkatkan kualitas guru, Pemerintah Kabupaten Solok juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah guru yang sudah sertifikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

--	--

Tabel 2.21
Perkembangan Guru Yang Sudah Sertifikasi
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	TK (Orang)	18	18	24	62	77	121
2	SLB (Orang)	3	4	5	7	8	10
3	SD (Orang)	805	835	1.289	1.579	1.732	2.250
4	SMP (Orang)	513	533	616	662	679	778
5	SMA (Orang)	281	286	293	300	325	332
6	SMK (Orang)	79	79	85	93	117	119
	Jumlah	1.699	1.755	2.312	2.703	2.938	3.610

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat peningkatan jumlah guru bersertifikasi baik dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari 1.699 pada tahun 2010 menjadi 3.610 tahun 2015 atau naik lebih dua kali lipat.

2.3.1.2. Urusan Wajib Kesehatan

Indikator pelayanan kesehatan ditunjukkan oleh Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesri Per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk, Cakupan Puskesmas, Cakupan Puskesmas Pembantu. Dapat dilihat bahwa perkembangan kinerjanya mengalami sedikit penurunan, hal ini karena tidak adanya penambahan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan, sementara jumlah penduduk terus mengalami kenaikan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada semakin ditingkatkan melalui Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bahkan khusus untuk RSUD Arosuka telah mengalami peningkatan status dari Type D ke Type C. Peningkatan status Rumah Sakit dari Type D ke Type C belum diiringi oleh peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas SDM tenaga medis maupun manajemen rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari data *Bed Occupation Rate* (BOR) Rumah Sakit yang mengalami penurunan

--	--

dimana pada Tahun 2015 BOR mengalami penurunan dari 27,02 % pada tahun 2013 menjadi 19,95% pada tahun 2015. Untuk melihat perkembangan kinerja pelayanan umum urusan wajib di bidang kesehatan secara lengkap tersaji pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Urusan Wajib
di Bidang Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	20,68	16,48	16,34	20,52	16,39	16,24
2	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesri Per Satuan Penduduk	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,002868	0,002835	0,0028116	0,002790	0,002769	0,002769
4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,1836	0,14	0,14	0,10	0,11	0,1
5	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	1,3512	1,4006	1,2870	1,2835	1,1215	1,32
6	Cakupan Jorong UCI (%)	57,49	60,20	54,05	36,61	71,01	49,39
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	66,94	83,45	73,51	84,39	77,41	76,46
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	33,09	33,51	40,36	47,04	40,14	39,55
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Puskesmas (%)	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57
12	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22
13	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	84,99	100,81	95,13	89,34	110,06	95,84
14	Angka Kematian Ibu Melahirkan	10	10	8	7	6	7
15	Bed Occupation Rate (BOR)	28,53	28,22	24,00	27,02	17,31	19,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2016

Dari segi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh indikator Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesri Per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk, Cakupan Puskesmas, Cakupan Puskesmas Pembantu dapat dilihat bahwa perkembangan kinerjanya mengalami sedikit penurunan, hal ini karena tidak adanya penambahan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan, sementara jumlah penduduk terus mengalami kenaikan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada semakin ditingkatkan melalui Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan

--	--

Kesehatan. Bahkan khusus untuk RSUD Arosuka telah mengalami peningkatan status dari Type D ke Type C.

Dari sisi jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk, perkembangan kinerjanya juga mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah dokter dan tenaga medis lebih rendah dibanding dengan perkembangan jumlah penduduk.

Selanjutnya pada bidang pelayanan kesehatan dasar khususnya pelayanan kesehatan anak dan ibu dapat dilihat melalui indikator Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Cakupan Jorong Universal *Child Immunization (UCI)*, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dan Angka Kematian Ibu Melahirkan. Seluruh indikator tersebut mengalami perkembangan yang berfluktuatif.

Namun jika dibandingkan capaian Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dapat terlihat bahwa indikator Rasio Pos Yandu per Satuan Balita, Cakupan jorong UCI, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan meningkat sehingga menjadi sebanyak 1.641 orang namun yang mendapat penanganan baru 1.134 orang sehingga cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani pada Tahun 2015 hanya sebesar 69,10%.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada Tahun 2015 angka ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah ibu bersalin dari 7.918 orang pada Tahun 2014 menjadi sebanyak 7.992 orang pada Tahun 2015, kondisi ini juga diiringi oleh penurunan jumlah ibu bersalin yang mendapat penanganan dimana pada Tahun 2014 sebanyak 6.129 orang menjadi sebanyak 6.111 orang pada Tahun 2015 sehingga Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada

--	--

Tahun 2015 hanya sebesar 76,46%. Untuk Angka Kematian Ibu melahirkan, perkembangannya mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan dimana pada Tahun 2014 Angka Kematian Ibu melahirkan adalah sebanyak 6 orang dan pada Tahun 2015 menjadi sebanyak 7 orang.

Cakupan Jorong UCI jika kita bandingkan dengan capaian Tahun 2014, angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2015 menjadi sebesar 49,39%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah jorong yang mendapat imunisasi balita dari 289 jorong pada Tahun 2014 menjadi 204 jorong pada Tahun 2015, kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok di masa mendatang. Selanjutnya indikator Cakupan Kunjungan Bayi mengalami penurunan pada Tahun 2015 dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah seluruh bayi yang lahir tidak diiringi oleh peningkatan yang signifikan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian indikator lain pada bidang pelayanan kesehatan dasar yaitu Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan DBD. Pada Tahun 2015 jumlah penderita TBC yang ditemukan dan diobati adalah sebanyak 227 orang, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2014 yaitu sebanyak 228 orang. Untuk penyakit DBD, pada Tahun 2015 terdapat peningkatan kasus DBD yang sangat signifikan yaitu dari 64 orang penderita DBD pada Tahun 2014 menjadi 203 kasus pada Tahun 2015. Keseluruhan penderita DBD tersebut dapat ditangani sesuai SOP sehingga Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD pada Tahun 2015 mencapai angka 100.

2.3.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Transportasi di Kabupaten Solok sangat sibuk karena Kabupaten Solok dilalui oleh jalur lintas Sumatera baik

--	--

menuju ke Padang maupun ke Bukittinggi. Disamping itu Kabupaten Solok memiliki perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Solok terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten serta Jalan lingkungan.

Pada Tabel 2.23 dapat dilihat tahun 2015 indikator proporsi jalan baik di Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan sehingga menjadi 59 % atau 694,27 km panjang jalan dalam kondisi baik dari panjang jalan seluruhnya yaitu 1.174,01 km. Sejalan dengan itu indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase juga mengalami kenaikan sehingga menjadi 149,32 Km pada Tahun 2015.

Tabel 2.23
Perkembangan Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	42	42	46	57	58	59
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	112,58	112,58	112,58	131,00	149,32	149,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok tahun 2016

Nama-nama ruas jalan yang dialihkan dari kewenangan kabupaten ke propinsi adalah Ruas Jalan Solok–Alahan Panjang (47,80 Km), Ruas Jalan Pasar Baru–Alahan Panjang (49,40 Km), Ruas Jalan Alahan Panjang–Kiliran Jao (72,90 Km), Ruas Jalan Sp.Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (28,40 km), Ruas Jalan Singkarak-Aripan-Tj.Balit-Padang Ganting (30 km), Ruas Jalan Pintu Angin-Labuah Saiyo (5,50 km), dan Ruas Jalan Rawang-Talawi (6 km). Sedangkan untuk indikator panjang jembatan dan jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Solok mengalami beberapa penurunan, hal ini disebabkan karena ada beberapa jembatan yang ada di Kabupaten Solok sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera

--	--

Barat, sehingga dari 222 buah jembatan dengan panjang 2.238 meter pada tahun 2012 hanya tinggal sebanyak 199 buah dengan panjang jembatan 1.870,10 meter pada akhir 2015.

Selain jalan, Infrastruktur irigasi memegang peranan penting bagi pembangunan di sektor pertanian. Infrastruktur irigasi berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan sehingga dapat mencapai hasil pertanian yang optimal.

Tabel 2.24
Perkembangan Fasilitas Irigasi di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik (Ha)	19.138	21.658,8	23.682,15	24.044,25	25.832,10	22.495,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016

Pada Tahun 2015 daerah irigasi yang berkondisi baik seluas 22.495 Ha, angka tersebut turun dari tahun sebelumnya. Jumlah daerah irigasi sebanyak 499 buah yang terdiri dari 230 buah daerah irigasi merupakan kewenangan Kabupaten Solok, 261 daerah irigasi kewenangan Pemerintah Nagari, 7 daerah irigasi kewenangan Provinsi dan 1 daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 230 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok mengaliri 23.428 Ha areal.

Penataan Ruang

Salah satu indikator kinerja bidang Urusan Penataan Ruang adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Solok meliputi daerah sekitar sungai, lapangan olah raga, makam, pekarangan rumah penduduk, pekarangan perkantoran dan tempat pariwisata. Berbagai program telah dilakukan untuk penataan ruang terbuka hijau diantaranya adalah program Pembuatan Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) seluas 17 Ha di daerah kompleks Perkantoran Pemerintahan

--	--

Kabupaten Solok bertujuan untuk menambah luasan ruang terbuka hijau, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktifitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan.

Pada Tahun 2015 Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan luas wilayah per HPL/HGB di Kabupaten Solok baru mencapai 1,40% atau baru seluas 645,65 Ha. Indikator lain yang menunjukkan perkembangan fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah indikator di bidang Penataan Ruangan yaitu ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir dan kekeringan. Luas wilayah produktif di Kabupaten Solok adalah sebesar 84,64% atau 285.782 Ha. Luas wilayah yang mengalami banjir adalah sebesar 0,09%, angka ini mengalami penurunan dibanding Tahun 2013 yaitu sebesar 1,34% dan luas wilayah kekeringan telah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi 1.425 Ha. Sedangkan ketaatan terhadap RT/RW adalah sebesar 98%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	0,022	1,48	1,46	1,43	1,40	1,40
2	Rasio Lahan Produktif	84,64	84,64	84,64	84,64	84,64	84,64
3	Luas lahan produktif	285.782	285.782	285.782	285.782	285.782	285.782
4	Rasio wilayah banjir	1,34	1,34	1,34	1,34	0,09	0,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016

2.3.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan urusan wajib Bidang Perumahan di Kabupaten Solok antara lain diukur dengan indikator rumah layak huni. Pada Tahun 2015 jumlah rumah layak huni di Kabupaten

--	--

Solok adalah 68,67% dari total rumah yang ada di Kabupaten Solok, berarti 31,33 % rumah tidak layak huni. Rumah layak huni ini jika dibandingkan dengan Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 9,28%. Dengan menurunnya rumah layak huni pada Tahun 2015 berarti rumah tidak layak huni mengalami peningkatan.

Sedangkan berdasarkan indikator Rasio Rumah Layak Huni dimana jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk, maka pada Tahun 2015 adalah sebesar 0,20, angka ini mengalami kenaikan dibanding capaian Tahun 2013 yang hanya sebesar 0,17. Kemudian jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 adalah 67,54%, sisanya yaitu 32,46% tidak mempunyai fasilitas sanitasi. Angka ini jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 menunjukkan kenaikan dimana pada Tahun 2014 hanya sebesar 46,07. Selanjutnya adalah indikator tentang tingkat pelayanan air bersih dimana pada Tahun 2015 jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih meningkat menjadi sebesar 64,42%. Kenaikan persentase rumah tangga pengguna air bersih dan bersanitasi disebabkan karena setiap tahunnya telah dibangun sarana penyediaan air bersih dan sanitasi yang bersumber dari DAK, PAMSIMAS dan sumber dana lainnya. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,19	0,19	0,19	0,17	0,20	0,20
2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	34,70	34,86	35,02	35,02	46,07	67,54
3	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	46,79	46,95	47,11	47,29	59,41	64,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok tahun 2016

2.3.1.5 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Salah satu indikator untuk menilai kinerja bidang urusan ini adalah Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

--	--

Rasio ini menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah. Perkembangan rasio ini dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami fluktuatif dan pada Tahun 2015 rasionya naik menjadi sebesar 2,80.

Disamping Satuan Polisi Pamong Praja, petugas perlindungan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio Linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang kondusif, demokratis dan interaktif. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Rasio Linmas di Kabupaten Solok perkembangan rasio Linmas dari Tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 rasio ini menjadi sebesar 48,45, angka ini mengalami penurunan dari Tahun 2014 yang mencapai angka 53,80. Penurunan ini disebabkan dengan adanya penambahan jumlah penduduk, sedangkan jumlah Linmas terus mengalami penurunan dimana pada Tahun 2015 menjadi sebanyak 1.762 orang dari 2.300 orang pada Tahun 2013.

Selain aparaturnya yang mewujudkan keamanan dan ketertiban, dukungan sarana dan prasarana juga akan mempengaruhi kondisi keamanan suatu lingkungan salah satunya adalah Pos Siskamling. Rasio Pos Siskamling per jumlah nagari dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 4,28 pada Tahun 2014 menjadi 4,00 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah pos siskamling yang ada di nagari mengalami penurunan dimana pada Tahun 2015 menjadi 296 unit dari 317 unit pada Tahun 2014. Salah satu tugas dan fungsi Satpol PP adalah penegakan Peraturan Daerah, indikator ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 yaitu 58 jumlah penyelesaian penegakan Perda dari 77 kasus pada Tahun 2014.

Indikator lain untuk menilai kinerja bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran. Indikator ini sedikit menunjukkan kenaikan

--	--

dimana pada Tahun 2015 menjadi sebesar 0,001100%. Hal ini disebabkan karena tidak bertambahnya jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Solok.

Kemudian pada sisi pelayanan administrasi pemerintahan juga telah ditingkatkan salah satunya dengan menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah sejak Tahun 2011 sehingga penyelesaian izin lokasi setiap tahunnya tercapai 100 %.

2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

Peningkatan kualitas pembangunan daerah sangat tergantung pada aspek perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. penyediaan data-data pendukung yang terkait dengan perencanaan pembangunan;
- b. penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Kalender Perencanaan dan Penganggaran;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, pelatihan serta Bimtek;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi sebagai pendukung dokumen perencanaan; dan
- e. mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tahap Musrenbang Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional.

Pada tabel berikut disajikan data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok.

Tabel 2.27
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Solok 2010-2015

No	Jenis	Jumlah Dokumen					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perda RPJPD 2006-2025	-	-	-	-	-	-
2	Perda RPJMD 2010-2015	1	-	-	-	1	-
3	Perda Bangunan Gedung	-	-	1	1	-	-
4	RKPD	1	1	1	1	1	1
5	Perbup KSCT	-	1	-	-	-	-
6	KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD	2	2	2	2	2	2
7	Kab. Solok Dalam Angka, PDRB	2	2	2	2	2	2

--	--

No	Jenis	Jumlah Dokumen					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10	Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1	1	-	1	-	-
11	Peta Daerah Tertinggal dan Rekomendasi Penanganan 24 Nagari Tertinggal Kabupaten Solok	-	-	1	1	-	-
12	Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Solok	-	-	-	-	1	1

Sumber : Bappeda Kab. Solok tahun 2016

2.3.1.7 Bidang Urusan Sosial

Kinerja layanan urusan wajib Bidang Sosial di Kabupaten Solok Tahun 2010 sampai Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Sosial
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial / penanganan PMKS (%)	48,64	24,98	94,76	11,11	11,11	80,82
3	Jumlah PMKS	14.809	14.854	7.755	12.125	12.125	12.013

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Solok tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja urusan sosial yang ditunjukan oleh indikator Penanganan PMKS mengalami kenaikan menjadi 80,82 % pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya perhatian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sehingga tahun 2015 telah dibantu sebanyak 12.013 PMKS.

2.3.1.8 Tenaga Kerja

Perkembangan kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat dari indikator rasio penduduk yang berkerja. Perkembangan indikator tersebut dari tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka capaian Tahun 2015 mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Angkatan Kerja dan pada Tahun 2015 mencapai angka sebesar 170.984 orang. Kenaikan pada kedua indikator tersebut tidak diikuti

--	--

oleh indikator rasio penduduk yang bekerja karena pada Tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja justru mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut ini :

Tabel 2.29
Perkembangan Rasio Jumlah Penduduk yang Bekerja
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk yang bekerja (Orang)	161.700	148.795	141.543	136.099	154.971	164.191
2	Angkatan kerja (Orang)	166.775	158.284	148.611	144.350	160.679	170.984
3	Rasio penduduk yang bekerja	96,95	94,01	95,24	94,28	96,44	96,03

Sumber : BPS Kab. Solok Tahun 2016

2.3.1.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indek Pembangunan Gender	90,27	90,73	91,17	93,44	95,45	95,73
2	Keterwakilan Perempuan di Parlemen (%)	5,71	5,71	5,71	5,71	8,57	8,57
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	61,71	62,54	63,21	56,37	56,99	*57,61
4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	90,37	92,44	95,27	94,42	94,51	94,60
5	Rasio KDRT	0,0071	0,0061	0,0161	0,0098	0.0048	0,01212
6	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	1,34	1,23	1,24	1,20	1,19	1,18
7	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100 % dari 5 Kasus	100 % dari 5 Kasus	100 % dari 13 Kasus	100 % dari 8 Kasus	100 % Dari 4 Kasus	100 % Dari 10 Kasus

Sumber : BKBPP Kab.Solok dan BPS Kab. Solok (2016)

--	--

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan perkembangan IPG Kabupaten Solok 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat bahwa IPG Kabupaten Solok tahun 2015 tercatat sebesar 95,73 yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang sebesar 95,45. Selanjutnya keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari indikator Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Perkembangan indikator ini dari Tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka capaian Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan yaitu hanya sebesar 0,09 %. Sedangkan keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kenaikan sehingga menjadi sebesar 8,57% pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Jika disandingkan perkembangan angka IPM Kabupaten Solok dengan angka IPG Kabupaten Solok maka dapat dilihat bahwa kenaikan angka IPG sejalan dengan kenaikan angka IPM.

Kemudian pada aspek perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat dari indikator jumlah tenaga kerja dibawah umur, Rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang terkait dengan kesehatan dan hak asasi manusia sehingga dengan kondisi tersebut maka pemerintah pusat, propinsi dan daerah terus berupaya dan berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Salah satu upaya adalah dengan dibentuknya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan penyuluhan. Disamping itu pemerintah juga terus melakukan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan secara tuntas dari kasus yang terjadi. Pada Tahun 2015 jumlah kasus yang terjadi mengalami kenaikan yaitu dari 4 kasus pada tahun 2014 menjadi 10 pada Tahun 2015 dan telah difasilitasi penyelesaiannya oleh pemerintah daerah secara tuntas. Kenaikan ini tentunya

--	--

menjadi perhatian bagi pemerintah agar angka ini terus mengalami kenaikan.

2.3.1.10 Urusan Wajib Pangan

Pada Tahun 2011 Kabupaten Solok telah menetapkan regulasi tentang Kebijakan Ketahanan Pangan sehingga mendorong terwujudnya ketersediaan pangan utama yaitu beras. Sampai Tahun 2015 ketersediaan pangan utama yaitu beras mencapai angka 529,80 kg/ka/th dengan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebesar 192.680.910 Kg. Dengan perkembangan harga yang cukup baik ini mendorong petani atau masyarakat untuk meningkatkan produksi padinya. Disamping itu pada Tahun 2015 ini cadangan pangan pemerintah baru mencapai angka 10 ton. Peningkatan ketersediaan pangan utama per tahun tersebut didukung dengan jumlah lumbung pangan yang telah dibangun yaitu sebanyak 19 unit.

Dari sisi konsumsi, rasio penduduk yang telah menerapkan Pola Pangan Harapan juga terus meningkat dimana pada Tahun 2015 adalah sebesar 80,1 %. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)	531,18	562,45	565,21	561,40	558,54	529,80
2	Jumlah Lumbung Pangan	2	4	2	8	3	2
3	Rasio penduduk yang telah menerapkan Pola Pangan Harapan	70,02	70,5	72,3	74,8	79,8	80,1
4	Kawasan rumah pangan lestari (Kelompok)	5	5	10	22	32	37

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan tahun 2016

2.3.2 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja bidang urusan Lingkungan Hidup adalah Persentase Penanganan Sampah. Mulai Tahun 2010 penanganan persampahan dikelola oleh Kantor

--	--

Lingkungan Hidup yang sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok. Sejak Tahun 2011 persentase penanganan persampahan semakin meningkat yaitu 10,18 % pada Tahun 2011 meningkat menjadi 23,11% pada Tahun 2015. Kenaikan persentase penganan sampah ini didukung oleh meningkatnya sarana prasarana persampahan yang didanai oleh dana DAK.

Indikator lain adalah pencemaran status mutu air. Perkembangan indikator pencemaran status mutu air Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 mengalami fluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka persentase jumlah sungai yang terpantau pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Selanjutnya Terhadap indikator Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk terjadi penurunan dari 0,04% pada Tahun 2013 menjadi 0,02% pada Tahun 2014. dan pada Tahun 2015 mencapai 0,03%

Indikator kinerja lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32

Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penangan sampah	14,63	10,18	12,55	17,98	20,95	23,11
2	Persentase Pencemaran status mutu air:						
	• Jumlah sungai yang terpantau	15,70	15,71	21,43	18,57	18,57	18,57
	• Jumlah danau yang terpantau	50	50	75	50	75	75
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	43	54	63	65	68	69
4	Persentase kasus Lingkungan yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100
5	Persentase TPS per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03

Sumber : Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (2016)

Dari segi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL, pada Tahun 2015 jumlah usaha yang telah memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL adalah 69, angka ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu sebanyak 68 buah. Jika dilihat dari jumlah usaha yang aktif maka pada Tahun 2015

--	--

sebanyak 20 buah. Dari 20 buah usaha tersebut semuanya sedang diawasi Amdal atau UKL-UPL.

Selanjutnya pada sisi penegakan hukum lingkungan, dari Tahun 2010 sampai 2015 persentase kasus lingkungan hidup yang terselesaikan adalah 100 %, artinya setiap kasus dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya peraturan di bidang lingkungan hidup yang telah diterbitkan yaitu 2 (dua) Peraturan Bupati Solok dan 7 (tujuh) Surat Keputusan Bupati Solok.

2.3.2.11 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mensukseskan Program Nasional Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, pada Tahun 2012 Kabupaten Solok telah melakukan penerapan e-KTP serta penerbitan NIK. Dari pelaksanaan program ini, maka pada Tahun 2015 dapat diketahui bahwa 71,06% penduduk Kabupaten Solok telah memiliki KTP dengan Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk sebesar 0,71. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan capaian pada Tahun 2014. Begitu juga dengan indikator rasio pasangan berakte nikah dimana pada Tahun 2015 angka ini mengalami sedikit kenaikan namun masih jauh dari kondisi ideal, untuk itu ke depan perlu mendapat perhatian dari pemerintah

Selanjutnya rasio bayi berakte kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dan angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 namun mengalami kenaikan pada Tahun 2015. Sebaliknya Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk pada Tahun 2015 adalah sebesar 30,94%, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel berikut:

--	--

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

NO	URUSAN/ INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,25	0,29	0,85	0,66	0,67	0,71
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,53	1	0,53	0,54	0,42	0,44
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,17	0,19	0,36	0,4	0,46	0,24
4	Kepemilikan KTP (%)	22,65	28,51	85,14	66,04	67,25	71,06
5	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	17,01	17,06	16,41	17,90	27,38	30,94
6	Kepemilikan KK	99.717	100.384	110.391	109.923	77.637	79.816

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tahun 2016

2.3.2.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional karena melalui program KB pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupan menjadi lebih berkualitas dan sejatera. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,68	1,19	0,67	0,93	0,76	0,72
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	348.566	352.705	355.077	358.383	361.095	363.684

Sumber : BPS Kabupaten Solok tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 berfluktuatif. Namun jika kita lihat dari capaian Tahun 2013 sampai Tahun 2015 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan keberhasilan program KB di Kabupaten Solok. Hal ini juga ditunjukkan oleh

--	--

indikator kinerja layanan urusan wajib Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Solok dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	URUSAN / INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	1,76	1,67	1,66	1,62	1,57	1,55
2	Total Fertility Rate	3,00	3,00	2,94	2,87	2,81	2,74
3	Rasio Akseptor KB	0,11	0,12	0,11	0,12	0,10	0,09
4	Jumlah Akseptor KB Baru	7.193	7.215	6.803	7.788	6.468	5.744
5	Jumlah Peserta KB Aktif	43.436	44.052	45.291	44.343	44.988	44.460
6	Jumlah Pasangan Usia Subur	59.777	60.330	61.000	62.558	62.159	63.063
7	MKJP (%)	33,93	33,93	34,66	36,96	35,10	33,84
8	Partisipasi KB Pria	1,19	1,19	1,41	1,38	1,27	1,06

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok

Keberhasilan program KB tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan indikator rata-rata jumlah anak per keluarga yang masih di bawah 2 yaitu 1,55 pada Tahun 2015 dan Total Fertility Rate (TFR) yang mencapai 2,74.

2.3.2.13 Urusan Wajib Perhubungan

Analisis Kinerja atas layanan urusan wajib pada bidang Urusan Perhubungan di Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Urusan / Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Arus Penumpang	91.694	82.500	80.372	83.069	84.596	86.112
2	Rasio Izin Trayek	0,0008	0,00156	0,00104	0,00116	0,00106	0,00095
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	6.209	6.633	7.075	7.114	7.075	7.190
4	Jumlah Terminal Bus	3	3	3	3	3	3
5	Jumlah Dermaga	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	671.582	682.843	691.751	743.400	766.100	861.120
7	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	658	637	640	641	641	641
8	Pemasangan Rambu-Rambu	-	211	325	463	180	113

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok (2016)

--	--

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kinerja perhubungan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator yang mengalami kenaikan walaupun beberapa indikator masih ada yang tetap. Indikator yang menunjukkan kenaikan seperti jumlah arus penumpang, rasio izin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum dan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

Kenaikan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan bahwa angkutan umum masih sangat dibutuhkan di Kabupaten Solok.

2.3.3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Solok melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk memberdayakan Lembaga Keuangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan tersebut diantaranya memberikan pelatihan dan pembinaan manajemen usaha terhadap UMKM serta memfasilitasi UMKM dengan pengusaha serta BUMN. Hal ini berdampak kepada semakin banyaknya jumlah UKM Non BPR atau LKM UKM di Kabupaten Solok dimana pada Tahun 2015 adalah sebanyak 12.786, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2010 yang tercatat sebanyak 4.000. Sementara jumlah BPR atau LKM di Kabupaten Solok masih tetap yaitu sebanyak 11 Unit. Disisi lain, persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami kenaikan dari 45,33% pada Tahun 2014 menjadi 47,71% pada Tahun 2015.

Tabel 2.37

Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	4.000	4.000	4.338	4.400	12.686	12.786
2	Jumlah BPR/LKM	11	11	11	11	11	11
3	Persentase Koperasi Aktif	58,04	57,34	43,36	45,27	45,33	47,71

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM tahun 2016

--	--

2.3.4 Penanaman Modal

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Solok berbagai usaha dilakukan untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. Dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014, jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) yang menanamkan modal di Kabupaten Solok terus meningkat namun angka ini pada Tahun 2015 menurun dan hanya 5 investor dengan jumlah investasi yang juga menurun menjadi sebesar 262 milyar rupiah. Dengan masuknya investor ke Kabupaten Solok maka semakin membuka kesempatan kerja sehingga rasio daya serap tenaga kerja pada Tahun 2015 menjadi sebesar 14,60 % dengan jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 73 orang. Untuk menggaet investor yang menanamkan modal di Kabupaten Solok didukung oleh kemudahan dalam proses perizinan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Dari kemudahan yang diberikan tersebut maka jumlah SIUP, TDP dan HO yang dikeluarkan pada Tahun 2015 mencapai 1.262 buah. Untuk lebih jelasnya perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional	8	9	11	11	16	5
2	Jumlah SIUP, HO TDP yang dikeluarkan	406	406	505	476	562	1262
3	Jumlah Tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	103	118	176	151	170	73

Sumber : Dinas KP3M tahun 2016

2.3.5 Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

2.3.5.1 Agama

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang sehat mental dan spiritualnya, pemerintah Kabupaten Solok melakukan penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah). Untuk melihat apakah penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK

--	--

berhasil dicapai dapat dilihat dari perkembangan indikator sarana tempat ibadah, jumlah peserta qurban, jumlah masyarakat yang membayar zakat (muzakki) dan jumlah nagari yang menerbitkan Perna Magrib Mengaji dan Jumat Hening. Berikut perkembangan Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 2.39
Perkembangan Rasio Tempat Ibadah
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Bangunan Tempat Ibadah / Jumlah Penduduk/ Rasio	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Masjid	312	312	313	314	316	314
2	Langgar	793	793	793	793	793	741
3	Mushalla	424	424	424	424	424	291
	Jumlah	1.529	1.529	1.530	1.531	1.533	1.192
4	Jumlah Penduduk	348.566	352.705	355.077	358.383	361.095	363.684
5	Rasio Tempat Ibadah	4,38	4,33	4,31	4,27	4,24	3,28

Sumber : Kemenag Kabupaten Solok tahun 2016

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Rasio Tempat Ibadah mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertambahan Tempat Ibadah lebih kecil dari pada pertambahan jumlah penduduk.

Selain rasio tempat ibadah, penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK dapat dilihat dari indikator sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya sesuai Falsafah ABS-SBK di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah peserta Qurban	11.239	9.018	15.765	15.765	15.184	16.364
2	Jumlah Masyarakat yang Berzakat	254.987	256.192	356.889	356.889	269.221	270.525
3	Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib Mengaji dan Jumat Hening	-	-	-	14	14	14

Sumber : Kemenag dan Bagian Kesra Kabupaten Solok tahun 2016

--	--

Berdasarkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 2.40 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan indikator tersebut dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 berfluktuasi. Jika dibandingkan capaian Tahun 2015 dengan Tahun 2014 maka capaian indikator jumlah peserta qurban mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai dampak kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelayanan pada peningkatan informasi keilmuan masyarakat tentang agama masih didominasi oleh da'wah secara lisan. Pengadaan informasi cetakan seperti buku bimbingan ibadah, sosial, perilaku dalam bahasa yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat awam perlu menjadi perhatian.

Selain data-data tersebut, program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan telah dilakukan antara lain terlaksananya pengiriman kafilah ke MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat, MTQ Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, wirid remaja, kunjungan Tim Ramadhan, wirid pengajian di kantor maupun majelis taklim, dan pemberian insentif kepada Guru TPA/TPSA, Imam/Khatib/Gharin, Mubaligh dan Penyuluh Agama.

2.3.5.2 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri

Kinerja urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari perkembangan indikator pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tersebut merupakan agenda rutin yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Pada Tahun 2015, kegiatan pembinaan tersebut mengalami penurunan karena hanya dilakukan 5 kali dari 6 (enam) kali pembinaan pada Tahun 2014. Begitu juga halnya dengan kegiatan pembinaan politik daerah juga terus dilakukan mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dimana pada Tahun 2015 telah dilaksanakan 3 kali dari 5 kali pada Tahun 2015. Selanjutnya perkembangan urusan ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah

--	--

LSM menjadi 26, jumlah Ormas menjadi 52, jumlah OKP menjadi 14 pada Tahun 2015.

Selanjutnya dalam rangka mendukung gerakan anti narkoba maka pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi anti narkoba bagi pelajar di sekolah dimana setiap tahunnya sebanyak 300 pelajar serta melaksanakan jambore BNK dengan jumlah peserta sebanyak 3.178 orang pada Tahun 2015.

Kemudian dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat, sejak Tahun 2013 telah dilakukan upaya untuk menyelesaikan konflik antar nagari dan antar kelompok masyarakat oleh Kominda. Pada Tahun 2015 jumlah potensi konflik antar nagari yang telah difasilitasi oleh Kominda meningkat menjadi 8 kasus dari 5 kasus pada Tahun 2014 sedangkan jumlah potensi konflik antar kelompok masyarakat yang telah difasilitasi oleh Kominda masih 1 kasus.

2.3.6 Kearsipan

Kinerja bidang Urusan Layanan Kearsipan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tahun 2011 sampai Tahun 2014 kinerja pengelolaan kearsipan mengalami kenaikan dengan capaian pada Tahun 2014 sebesar 22,22 %. Pada Tahun 2015 angka ini menurun karena jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 6 SKPD pada Tahun 2014 hanya tinggal 4 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku pada Tahun 2015. Aparatur yang telah dilatih tentang pengelolaan kearsipan sampai Tahun 2015 telah mencapai 550 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah SKPD Pengelola Arsip Secara Baku (%)	-	-	3,70	11,11	22,22	14,81
2	Jumlah Pengelola Kearsipan Yang Dilatih (orang)	100	100	150	100	100	100

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan tahun 2016

--	--

2.3.7 Perpustakaan

Kinerja bidang Urusan Layanan Perpustakaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tersedianya perpustakaan yang representatif akan meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, hal ini tentunya akan mempercepat pembangunan sumber daya manusia. Kondisi perpustakaan di Kabupaten Solok dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan yang dibina (Pos)	31	32	42	42	54	45
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (%)	8	7,64	6,80	7,35	10,40	11,64
3	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eks)	4.821	4.841	5.897	7.278	7.279	7.092
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.110	10.710	12.050	16.728	17.154	20.325

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan tahun 2016

Untuk meningkatkan kualitas pustaka di Kabupaten Solok maka telah dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pustaka tersebut. Sampai Tahun 2015 jumlah perpustakaan yang telah dibina adalah sebanyak 73 pustaka. Dari 73 pustaka yang dibina tersebut 45 merupakan pustaka nagari. Kinerja urusan perpustakaan juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu 7,64% pada Tahun 2011 menjadi 11,64% pada Tahun 2015.

Jika dilihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, pada Tahun 2015 jumlah koleksi buku di perpustakaan mengalami penurunan dibanding dengan jumlah koleksi buku pada Tahun 2014. Penurunan ini disebabkan karena beberapa judul buku yang telah dipinjam oleh pengunjung tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Untuk itu, di masa mendatang

--	--

perlu diupayakan penambahan koleksi buku perpustakaan baik dalam judul maupun jumlahnya serta peningkatan pengawasan terhadap distribusi buku.

2.3.8 Layanan Urusan Pilihan

2.3.8.1 Kelautan dan Perikanan

Penyumbang PDRB selanjutnya diikuti oleh kontribusi sub sektor perikanan dengan angka 1,96% pada Tahun 2015.

Pada bidang kelautan dan perikanan khususnya perikanan air tawar juga menunjukkan kinerja yang semakin meningkat yaitu dengan produksi perikanan mencapai 3.405,2 Ton pada Tahun 2015. Angka ini jauh mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan produksi pada Tahun 2011 yang berjumlah 1.519,03 Ton. Meningkatnya produksi perikanan ini tentunya merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Solok diantaranya adalah Rehabilitasi atau Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan seperti BBI, pengadaan jaring langli dan keramba serta pengadaan induk ikan dan benih ikan serta pakan ikan baik melalui sumber dana APBD Kabupaten Solok maupun dari dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih jelasnya kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2010 sampai 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan (ton)	967,52	1519,03	1.951,96	2.474,2	3.238,92	3.405,2
2	Konsumsi ikan (kg/cap/th)	20	22,41	104	100	100	100,65
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	16	22,09	20,93	55,56	54,69	66,67
4	Cakupan bina perikanan :						
	- Pembudidayaan (orang)	4.701	4.701	4.769	3.382	3.745	3.382
	- Nelayan (orang)	1.425	1.595	1.395	1.190	1.370	4.487
	- pengolah dan pemasaran ikan (orang)	5	12	155	155	160	189
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	154,32	241,8	305,6	362,2	393,82	406,70

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok tahun 2016

--	--

2.3.8.2 Pariwisata

Pada urusan kepariwisataan, kinerja pembangunan pariwisata Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Sektor Pariwisata
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan Wisata Mancanegara (org)	233	233	364	70	508	752
2	Kunjungan Wisata Nusantara (org)	233.749	453.380	539.325	437.464	440.066	364.374
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,73
4	Jenis Objek Wisata:						
	Alam	70	70	70	70	70	70
	Budaya	30	30	30	30	30	30
	Sejarah	23	24	24	23	23	23

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2016

Sektor pariwisata di Kabupaten Solok mengalami perkembangan yang lambat bahkan mengalami kenaikan pada Tahun 2015, hal ini ditandai dengan perkembangan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Solok yang mengalami kenaikan dari 0,69 persen Tahun 2014 menjadi 0,73 tahun 2015. Walaupun perkembangan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara meningkat namun tidak memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok hal ini disebabkan karena wisatawan yang datang hanya sekedar berkunjung dan tidak menginap. Lambatnya perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti restoran, hotel, penginapan yang masih sangat sedikit. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata dengan merubah paradigma pengembangan pariwisata yang selama ini mengandalkan keindahan sumber daya alam dengan menggali potensi wisata lain seperti budaya dan sejarah yang berdaya jual dan berdaya saing tinggi. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak dan Danau Kembar, pembenahan objek wisata budaya

--	--

dan sejarah, promosi melalui berbagai even nasional dan internasional seperti pameran dan Tour De Singkarak.

2.3.8.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama Kabupaten Solok yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran pertanian dalam perekonomian daerah tergambar dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 5 Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2011-2015, kontribusi Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 mencapai angka 38,63%, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,01	41,95	40,70	39,81	39,10	38,63

Sumber: BPS Kabupaten Solok (2016)

Sub lapangan usaha peternakan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu 47,02% dari seluruh nilai tambah pertanian kemudian diikuti oleh sub lapangan usaha tanaman pangan yaitu sebesar 32,49% dan sub lapangan usaha tanaman hortikultura tahunan yaitu sebesar 25,02%.

Jika dilihat peranan sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan maka sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar setiap tahunnya sehingga pada Tahun 2015 tercatat sebesar 97,18%.

Indikator lain untuk melihat kinerja penyelenggaraan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan dapat dilihat pada Tabel berikut :

--	--

Tabel 2.46
Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan di Kabupaten
Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	5,74	5,83	5,7393	5,7359	5,7485	5,55
2	Persentase kelompok tani yang mendapat bantuan	52,54	55,27	57,67	75,38	75,56	82,99
3	Luas Penangkaran Padi Sawah (Ha)	110	110	302	182	109	187
4	Luas cakupan lahan pengairan melalui pengembangan jaringan irigasi (Ha)	670	690	670	1200	1300	9984
5	Luas cakupan areal yang berpengairan embung/parit (Ha)	76	195	75	90	45	862
6	Panjang jalan usaha tani (Km)	-	4	-	13	7	23,98
7	Luas Penambahan Lahan Pertanian Organik (Ha)	20	22	70	-	170	75
8	Penggunaan bibit unggul hortikultura (Ha)	2.525	2.626	2.727	2.316	2.356	2.793

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Solok tahun 2016

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa aspek di antaranya pengalihan penggunaan lahan sawah. Pada sisi lain kinerja pertanian dapat dilihat dari semakin baiknya capaian beberapa indikator seperti kelompok tani yang mendapat bantuan menjadi 82,99%, luas penangkaran padi sawah menjadi sebesar 187 Ha, luas cakupan lahan pengairan melalui pengembangan jaringan irigasi menjadi 9.984 Ha, Luas cakupan areal yang berpengairan embung/parit menjadi 862 Ha, Panjang jalan usaha tani yang mencapai 23,98 Km dan Penggunaan bibit unggul hortikultura yang mencapai 2.793 Ha. Peningkatan capaian tersebut salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan dukungan dana yang bersumber dari DAK.

Selanjutnya di sub bidang Pertanian yaitu peternakan, kontribusinya terhadap PDRB kategori pertanian, peternakan,

--	--

perburuan dan jasa pertanian mengalami fluktuasi, namun capaian pada Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan di banding capaian Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Bidang Peternakan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	4,61	4,83	4,91	4,94	4,95	5,05
2	Jumlah populasi ternak :						
	a. Sapi (ekor)	30.930	32.419	35.113	36.219	37.025	38.268
	b. Kambing/domba (ekor)	16.118	16.564	18.071	18.943	19.364	19.608
	c. Unggas (ekor)	452.281	445.452	533.612	716.905	830.757	3.326.846
3	Pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak (dosis)	6.913	6.833	6.151	7.336	9.423	10.855
4	Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan	-	-	13	3	108	115
5	Jumlah pasar khusus yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	1	1	1	1	2	1

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok (2016)

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa kinerja urusan peternakan menunjukkan hasil yang bagus, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah populasi ternak selama 5 Tahun terakhir. Peningkatan jumlah populasi ternak ini didukung oleh peningkatan pembinaan terhadap kelompok tani dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

2.3.8.4 Kehutanan

Sub sektor yang kehutanan dan penebangan kayu kontribusinya terus turun sehingga pada Tahun 2015 hanya sebesar 0,86%. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

--	--

Tabel 2.48
Perkembangan Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Solok Tahun
2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kehutanan dan penebangan kayu	0,97	0,95	0,93	0,91	0,91	0,86

Sumber: BPS Kabupaten Solok (2016)

Berikutnya pada urusan kehutanan, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Sektor Kehutanan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	9,9	11,52	9,63	11,63	6,03	1,89
2	Kerusakan kawasan hutan (%)	12,98	12,98	13,98	11,44	6,1	6,1

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok (2016)

Berdasarkan data pada Tabel 2.46 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor kehutanan selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan salah satunya disebabkan karena turunnya angka rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

2.3.8.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada urusan energi dan sumber daya mineral, kinerja pembangunannya selama periode Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

--	--

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	32,01	32,80	31,93	32,03	32,03	32,03
2	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (%)	3,8	5,46	5,53	5,68	5,9	5,97
3	Jumlah potensi lokasi panas bumi	-	-	-	1	3	2
4	Jumlah PLTMH	16	16	18	20	21	21
5	Jumlah PLTS	1.017	1.094	1.236	1.261	1.293	1.293
6	Jumlah <i>Phycohydro</i>	4	4	4	4	4	4
7	Jumlah <i>Minihydro</i>	47	47	51	55	57	57
8	Jumlah rumah yang dialiri PLTS	132	132	132	222	302	302
9	Jumlah rumah yang dialiri PLTMH	1.661	1.788	1.856	1.931	2.021	2.087
10	Jumlah rumah yang dialiri <i>Phycohydro</i>	145	145	145	145	145	145

Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok (2016)

Kinerja sektor energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB yang menurun yaitu 5,90 % pada Tahun 2014 menjadi 5,97 % pada Tahun 2015. Selain itu kinerja energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dari perkembangan PLTMH, PLTS, *Phycohydro* dan *minihydro* yang berdampak terhadap rumah tangga yang dialiri listrik melalui PLTMH, PLTS, *Phycohydro* dan *minihydro*.

2.3.8.6 Perdagangan

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan oleh kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang ditunjukkan pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Sektor Perdagangan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	9,71	9,74	9,87	9,78	9,62	10
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	25,59	23,56	23,52	25,59	26,32	27,56

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Solok (2016)

--	--

Berdasarkan data sebagaimana tertuang Tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja sektor perdagangan mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Solok pada Tahun 2011 sebesar 9,74% menjadi 10% pada Tahun 2015. Disisi lain kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal yang mendapat binaan dari Pemerintah Kabupaten Solok dari 23,56% pada Tahun 2011, menjadi 27,56% pada Tahun 2015. Kondisi ini akan terus ditingkatkan untuk tahun berikutnya melalui pelatihan, memfasilitasi dengan BUMN dan sebagainya.

2.3.8.7 Perindustrian

Selama periode 2010 sampai 2015 kinerja urusan perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Kinerja Sektor Perindustrian
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	5,55	5,67	5,67	5,52	4,95	5,52
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Pertumbuhan industri (%)	14,22	18,94	5,08	3,79	5,03	5,76
4	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	11,68	2,22	3,01	12,84	6,67	7,06

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Solok tahun 2016

kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Solok terus mengalami penurunan yaitu 5,67% pada Tahun 2011 menjadi 5,57% pada Tahun 2015. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kinerja sektor industri dan perdagangan ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok di tahun mendatang.

2.3.9 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Wilayah Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti letusan

--	--

gunung api, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena kedudukan Kabupaten Solok secara tektonik yang termasuk dalam lempeng benua Asia yang ditunjam lempeng Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera. Penunjaman kedua lempeng tersebut menghasilkan beberapa patahan aktif didaratan Sumatera berupa Patahan Besar Sumatera (Patahan Semangko).

Patahan aktif Semangko tersebut memanjang pada ruas Kecamatan Pantai Cermin, Danau Diatas, Danau Dibawah ke utara sampai Danau Singkarak dan membentuk graben Kota Solok yang merupakan bagian dari patahan aktif sepanjang Sumatera. Jalur patahan – patahan aktif di Kabupaten Solok melintasi mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke Utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Diatas – Danau Dibawah Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak. Akibat pergerakan patahan aktif utama timbul patahan aktif ikutan lain yang berdimensi lebih kecil sejajar dengan jalur patahan utama (Sumatera) tersebar di Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung sedikit di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Payung Sekaki terus ke Utara.

Jalur gempa utama di Kabupaten Solok berada pada sepanjang jalur patahan Sumatera yang melintasi Kabupaten Solok. Bila terjadi pelepasan energi yang terjadi di Samudera Hindia dengan kekuatan > 7 SR, maka akan sangat berpotensi menghasilkan gempa sepanjang patahan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian serta observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kabupaten Solok terdiri dari :

- 1) Bencana Alam Gempa Bumi Patahan Aktif
- 2) Bencana Alam Gunung Api Talang
- 3) Gerakan Tanah
- 4) Bencana Alam Erosi
- 5) Angin puting beliung

Berikut disajikan data tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Solok dari Tahun 2011 s/d 2015:

--	--

Tabel 2.53
Perkembangan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Jenis Bencana	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kebakaran rumah/lahan, dll (kali)	4	51	31	-	32	48
2	Angin Puting Beliung (kali)	1	4	1	16	3	2
3	Banjir dan tanah longsor (kali)	12	4	3	17	16	13

Sumber : BPBD Kab. Solok tahun 2016

Untuk penanganan bencana tersebut Kabupaten Solok didukung oleh sarana dan prasarana seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2.54
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Mobil Damkar dan peralatannya	4
2	Perahu Karet	4
3	Speed Boat	1
4	Mobil lapangan dapur umum	1
5	Genset	3
6	Tenda	21
7	Radio HT	18
8	Radio RIG, SSB dan HF/FM	3
9	Telepon Mobile	1
10	Matras	205
11	Peralatan Vertikal Rescue	1
12	Posko Damkar	4
13	Kendaraan trail	5
14	Repeater	1
15	Water Treatment	1
16	Pelampung	10

Sumber : BPBD Kab. Solok tahun 2016

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi, berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lain sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah ini dilihat dari segi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

--	--

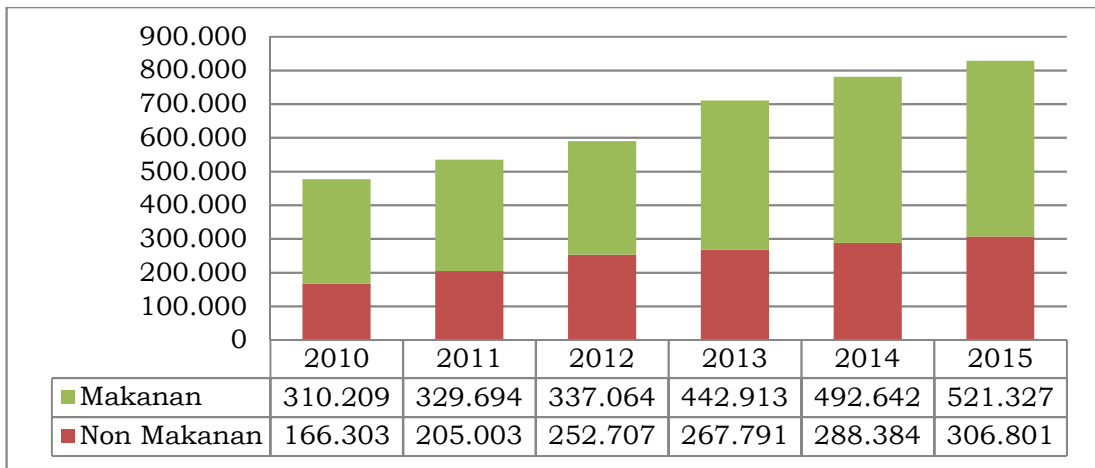
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Untuk melihat kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Solok dilakukan salah satunya dengan menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan produktifitas total daerah.

Secara umum meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumah tangga miskin cenderung menggunakan proporsi pendapatan untuk konsumsi pangan lebih besar dibanding non pangan.

Grafik 2.5

Pengeluaran Perkapita Perbulan Menurut Kelompok Komoditas Di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Kab. Solok Tahun 2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi perkapita dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan. Pengeluaran konsumsi perkapita masih pengeluaran konsumsi rumah tangga jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi Non Pangan Perkapita. Perkembangan pengeluaran konsumsi Non Pangan Perkapita mengalami kenaikan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 hal ini berarti menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari indikator produktifitas total daerah. Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

--	--

Produktifitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktifitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Perkembangan produktifitas total daerah ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.55
Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
		Nilai Tambah (Milyar)		Jumlah Angkatan Kerja (Orang)		Produktifitas Total Daerah (Rupiah)	
1	Pertanian	1.150,9	1210,00	64.388	56.662	17.874.448,65	21.354.699,80
2	Industri Pengolahan	197,17	206,5	4.527	4.768	43.554.230,17	43.314.105,93
3	Perdagangan, Hotel dan restoran	415,67	440,60	31.200	30.330	13.322.756,41	14.526.871,08
4	Jasa-jasa	371,94	389,35	35.192	35.084	10.568.879,29	11.097.651,35
5	Lain-lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, jasa bangunan dan jasa perusahaan)	630,63	668,70	19.664	23.225	32.070.280,72	28.792.249,73
	Jumlah	2.766,31	2.915,15	154.971	150.068,5	17.850.501,06	19.425.462,37

Sumber : BPS Kab. Solok (2016)

2.4.2. Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Pada sektor perbankan, Kabupaten Solok difasilitasi oleh 3 unit Bank Pemerintah dan 6 unit BPR. Disamping itu Kabupaten Solok memiliki fasilitas restoran dan penginapan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Restoran dan Hotel Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran :						
	Tipe A	1	1	1	1	1	1
	Tipe B	3	3	3	3	3	3
	Tipe C	46	46	47	47	82	83
2	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan /Hotel :						
	Penginapan Tipe Melati	5	5	5	5	5	3
	Hotel Tipe Melati	1	1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok tahun 2016

--	--

Pada bidang keuangan, berikut disajikan data tentang pajak dan retribusi daerah dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015:

Tabel 2.57
Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

NO	URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	a. Pajak Daerah							
	- Pajak hotel	OBJEK	5	5	3	3	3	2
	- Pajak restoran	OBJEK	86	86	81	81	91	101
	- Pajak hiburan	OBJEK	1	1	1	0	0	0
	- Pajak reklame	OBJEK	914	914	142	142	409	409
	- Pajak penerangan jalan	OBJEK	1	1	1	1	1	1
	- Pajak Air Tanah	OBJEK	0	0	0	0	1	1
	- Pajak pengembalian bahan galian Gol. C	OBJEK	6	6	6	6	11	1
	- Pajak Sarang Burung Walet	OBJEK	1	1	1	1	1	3
	- Pajak BPHTB	WP	42	42	31	72	189	474
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	WP	169990	169990	170308	170492	168555	173069
	b. Retribusi Daerah							
	- Retribusi jasa umum	JENIS	10	10	10	10	8	8
	- Retribusi jasa usaha	JENIS	8	8	8	8	8	8
	- Retribusi perizinan tertentu	JENIS	4	4	4	4	4	4
	c. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan							
	- Bagian laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah	LBG	1	1	1	3	3	3
2.	Jenis Kelas dan Jumlah Restoran							
	- Tipe A	Unit	1	1	1	1	1	1
	- Tipe B	Unit	3	3	3	3	3	3
	- Tipe C	Unit	46	46	47	47	82	83
3.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel							
	- Penginapan Tipe Melati	Unit	5	5	5	5	5	3
	- Hotel Tipe Melati	Unit	1	1	1	1	1	2

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

--	--

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu

Keuangan daerah merupakan komponen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada prinsipnya APBD terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sementara pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dari pelaksanaan APBD setiap tahunnya dan neraca keuangan daerah. Komponen ini perlu mendapat perhatian karena merupakan ukuran yang menentukan kinerja keuangan daerah. Sedangkan neraca daerah memperlihatkan perkembangan kondisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada periode tertentu.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Solok selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,82% per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dari jumlah nominal banyak bersumber dari dana perimbangan yang mengalami peningkatan dari 492.563 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 802.966 juta rupiah atau tumbuh sebesar 10,31%. Sementara dari segi persentase, lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan paling tinggi dari 41.185 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 24.907 juta rupiah atau tumbuh sebesar 44,03%.

Pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun 2010-2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

--	--

Tabel 3.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert. (%)
1	Pendapatan	553.370	661.368	726.987	857.925	988.823	1.101.439	14,82
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	19.622	30.631	26.678	31.490	51.522	55.566	26,54
1.1.1.	Pajak Daerah	3.151	5.374	6.233	6.930	10.314	10.847	30,34
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.162	4.993	5.911	9.442	15.296	11.185	26,64
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yg dipisahkan	3.119	5.201	4.858	5.640	5.998	5.641	15,33
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	9.190	15.063	9.676	9.478	19.914	27.893	35,25
1.2.	Dana Perimbangan	492.563	555.673	600.756	681.298	763.142	802.966	10,31
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	26.660	22.644	24.234	21.748	20.572	18.209	-7,04
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	415.421	481.015	521.759	588.040	651.730	676.074	10,31
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	50.482	52.014	54.763	71.510	90.840	108.683	17,11
1.3.	Lain-Lain pendapatan daerah yang sah	41.185	75.064	99.553	145.137	174.159	242.907	44,03
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Dana darurat	-	-	350	752	686	15.047	733,17
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya	16.663	20.557	22.158	23.579	31.675	38.273	18,55
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	23.904	45.105	76.720	107.854	134.534	184.870	52,30
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	618	9.402	325	12.952	7.264	4.717	1026,21

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok tahun 2015 tercatat sebesar 55.566 juta rupiah yang sebagian besar disumbangkan oleh lain-lain PAD yang sah sebesar 27.893 juta rupiah atau 50,20%, retribusi daerah 11.185 juta rupiah atau 20,13%, pajak daerah 10.847 juta rupiah atau 19,52%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 5.641 juta rupiah atau 10,15%. Dana perimbangan Kabupaten Solok tahun 2015 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) 84,20%, Dana Alokasi Khusus (DAK) 17,11%, dan Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak 2,27%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2015 sebagian besar bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 76,11%, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya

--	--

18,19%, dana darurat 6,19% dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya 1,94%.

Proporsi PAD cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini terlihat pada tahun 2012 terjadi penurunan dibanding tahun 2011 hal ini disebabkan karena adanya beberapa uraian Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Retribusi Daerah yang dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri. Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Solok (ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan) terhadap Dana Perimbangan sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari sumber pendapatan daerah tahun 2015 sebesar 72,90% berasal dari Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 22,05%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya berkontribusi sebesar 5,04%, data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	3,55	4,63	3,67	3,67	5,21	5,04
Dana Perimbangan	89,01	84,02	82,64	79,41	77,18	72,90
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7,44	11,35	13,69	16,92	17,61	22,05
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

3.1.1.2. Belanja Daerah

Pengklasifikasian belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan berbagai metode, antara lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait

--	--

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Belanja operasional mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Solok periode 2010-2015 seperti terlihat pada Tabel 3.3. Belanja daerah mengalami peningkatan dari 537.104 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 1.050.303 juta rupiah pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata 14,39% per tahun. Kenaikan belanja ini lebih rendah dari kenaikan pendapatan yang rata-rata per tahun sebesar 14,82% sehingga menyebabkan terjadinya SILPA.

Struktur belanja daerah selama periode 2010-2015 masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung, dimana tahun 2010 dari 537.104 juta rupiah total belanja sebesar 414.024 juta rupiah atau 77,08% merupakan Belanja Tidak Langsung dan 123.080 juta rupiah atau 22,92% adalah Belanja langsung. Dibandingkan tahun 2010, tahun 2015 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak Langsung dari total belanja yakni menjadi 63,00%, sedangkan Belanja Langsung naik menjadi 37,00% yang artinya proporsi belanja untuk pembangunan di Kabupaten Solok semakin meningkat. Belanja Tidak Langsung tahun 2015 tercatat sebesar 661.667 juta rupiah, dimana

--	--

92,55% merupakan belanja pegawai, 3,26% belanja bantuan keuangan.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015 (Dalam juta Rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumb. (%)
	Belanja	537.104	640.519	734.200	826.295	948.937	1.050.303	14,39
A	Belanja Tidak Langsung	414.024	441.748	487.710	542.062	591.242	661.667	9,85
1	Belanja Pegawai	368.493	408.846	450.059	506.567	556.979	586.011	9,75
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	20.303	12.252	11.160	9.208	8.730	22.142	16,48
5	Belanja Bantuan Sosial	5.756	3.594	660	3.408	4.002	-	42,92
6	Belanja Bagi Hasil	1.007	995	807	950	1.048	-	-18,41
7	Belanja Bantuan Keuangan	17.843	14.396	18.342	19.176	17.354	50.420	38,74
8	Belanja Tidak terduga	622	1.665	6.682	2.753	3.129	3.094	84,55
B	Belanja langsung	123.080	198.771	246.490	284.233	357.695	388.636	27,06
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	67.682	111.621	111.518	139.944	181.769	209.327	27,07
3	Belanja Modal	55.398	87.150	134.972	144.289	175.926	179.309	28,59

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kabupaten Solok tahun anggaran 2015 tercatat sebesar 95.913 juta rupiah yang naik rata-rata 31,26 persen dari tahun 2010. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Solok tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

--	--

Tabel 3.4
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pembiayaan	32.839	46.957	63.388	37.842	62.410	95.913	31,26
1	Penerimaan Pembiayaan	33.338	51.194	68.189	47.219	69.780	103.953	30,55
2	Pengeluaran Pembiayaan	499	4.237	4.801	9.377	7.370	8.040	169,08

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Disisi aset, Kabupaten Solok memiliki aset senilai 1,4 trilyun rupiah tahun 2015 yang rata-rata tumbuh 6,95 persen pertahun dari tahun 2010. Jumlah aset terbesar berupa aset tetap yang mencapai 1,1 trilyun rupiah atau 91.7 persen dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Solok.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2015 adalah sebesar 3,6 milyar rupiah. Dari tahun 2010 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah

--	--

tahun 2011 dan tertinggi tahun 2014. Oleh karena itu, nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Solok tahun 2015 mencapai 1,43 trilyun rupiah, dan mengalami kenaikan dari tahun 2010 yang tercatat sebesar 1,08 triliun rupiah.

Perkembangan Neraca Kabupaten Solok dari Tahun 2010-2015 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pertumbuhan Neraca Kabupaten Solok Tahun 2015-2021
(dalam juta rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pert(%)
ASET							
Aset Lancar	78.609	78.609	58.425	78.792	123.969	177.766	21,98
Investasi Jangka Panjang	4.688	16.223	36.417	45.560	48.966	62.648	39,09
Aset Tetap	989.444	1.198.867	1.318.565	1.447.083	1.630.862	1.175.899	5,14
Dana Cadangan							
Aset Lainnya		1.180	2.432	15.307	28.166	18.047	136,72
JUMLAH ASET	1.082.741	1.294.879	1.415.839	1.586.742	1.831.963	1.434.360	6,95
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
KEWAJIBAN							
Kewajiban Jangka Pendek	1.095	372	5.214	419	3.802	3.603	389,16
Kewajiban Jangka Panjang							
JUMLAH KEWAJIBAN	1.095	372	5.214	419	3.802	3.603	389,16
EKUITAS DANA							
Ekuitas Dana Lancar	78.236	78.236	53.211	78.372	120.168	1.430.757	231,85
Ekuitas Dana Investasi	1.003.410	1.216.271	1.357.414	1.507.951	1.707.995		-8,57
JUMLAH EKUITAS DANA	1.081.646	1.294.507	1.410.625	1.586.323	1.828.163	1.430.757	6,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.082.741	1.294.879	1.415.839	1.586.742	1.831.965	1.434.360	6,95

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio lancar digunakan untuk

--	--

melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya. Nilai *Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Nilai rasio keuangan Kabupaten Solok tahun 2010-2021 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rasio Likuiditas						
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	71,79	211,31	11,21	188,05	32,61	49,34
2	Rasio Cepat (Quick Ratio)	68,55	195,25	9,99	177,54	31,42	49,34
	Rasio Solvabilitas						
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0010	0,0003	0,0037	0,0003	0,0021	0,0025
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0010	0,0003	0,0037	0,0003	0,0021	0,0025

Sumber : DPPKA Kab. Solok tahun 2016 (diolah)

Nilai rasio lancar tahun 2015 sebesar 49,34 memberikan informasi bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Solok membayar hutang sebesar 49 kali. Selanjutnya nilai rasio cepat 49,34 menggambarkan kemampuan pemerintah Kabupaten Solok membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva

--	--

lancar sangat baik. Rasio Solvabilitas Kabupaten Solok sangat baik, hal ini terlihat dari rasio total hutang terhadap aset Kabupaten Solok yang dari tahun 2010-2015 nilainya sangat kecil dengan nilai paling tinggi 0,002. Rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap modal dari tahun 2010-2015 nilainya hampir sama karena jumlah total aset dan modal hanya kecil selisihnya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas

--	--

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010-2015
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun 2010	368.493	537.104	68,61
2	Tahun 2011	408.846	640.519	63,83
3	Tahun 2012	450.059	734.200	61,30
4	Tahun 2013	506.189	826.295	61,26
5	Tahun 2014	556.255	948.937	58,62
6	Tahun 2015	586.011	1.050.303	55,79

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok tahun 2016 (diolah)

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2015, total belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun secara persentase mengalami penurunan dari 61,26 persen tahun 2013 menjadi 55,79 persen tahun 2015. Penurunan porsi belanja pegawai dari tahun ke tahun akan berimplikasi pada meningkatnya porsi belanja langsung yang berkaitan dengan upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pemerintah daerah Kabupaten Solok mengalami kenaikan surplus riil anggaran dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 surplus riil tercatat sebesar 43,09 milyar naik 32,54 persen dari tahun 2014

--	--

artinya kenaikan pendapatan melebihi kenaikan belanja. Surplus riil anggaran terjadi karena adanya penghematan belanja dan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu. Kondisi pembiayaan daerah selengkapanya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi pendapatan daerah	553.370	661.368	726.987	857.925	988.823	1.101.439
	Dikurangi						
2	Realisasi belanja daerah	537.104	640.519	734.200	826.295	948.937	1.050.303
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	499	4.237	4.801	9.377	7.370	8.040
	Surplus/Defisit riil	15.767	16.612	-12.014	22.253	32.516	43.096

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

Peningkatan realisasi pendapatan belum diimbangi oleh kemampuan membelanjakan yang lebih baik sehingga SILPA dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nilai SILPA Kabupaten Solok tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Solok
Tahun 2013-2015 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	49.601		67.828		46.804		69.474		102.277		64.765	
2	Pelampauan penerimaan PAD	(1.008)	(0,02)	1.488	0,02	2.027	0,04	(1.927)	(0,03)	8.833	0,09	7.631	0,12
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	2.280	4,60	946	1,39	(1.488)	(3,18)	(836)	(1,20)	(1.881)	(1,84)	(15.646)	(24,28)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.518	5,08	(1.707)	(2,52)	(39)	(0,08)	6.005	8,64	305	0,30	845	1,31
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

Selanjutnya dihitung Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2013-2015.

--	--

Tabel 3.10
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Saldo kas neraca daerah	49.601	67.828	46.804	69.474	102.277	64.765
	Dikurangi						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0
	Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran	49.601	67.828	46.804	69.474	102.277	64.765

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok (2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat kewajiban yang belum terselesaikan sehingga saldo kas daerah Kabupaten Solok sama dengan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik yang mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016-2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Untuk periode Tahun Anggaran 2016-2021, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- 1. optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan kondisi daerah antara lain dengan:
 - a. mengevaluasi semua produk hukum daerah (Peraturan Daerah) yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;

--	--

- b. melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
 3. peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* dan mendorong para wajib pajak daerah untuk lebih meningkatkan kesadaran perpajakan untuk membayar pajaknya sendiri (*self assessment*);
 4. memperbaiki penyediaan fasilitas, pelayanan dan tertib administrasi diberbagai objek retribusi daerah, sehingga mendorong masyarakat untuk membayar retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah;
 5. mendorong kreatifitas perangkat daerah untuk mengintensifkan pemungutan PAD serta mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah kepada masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi daerah; dan
 6. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah dan dengan lembaga pemerintah tingkat atas, agar semua sumber pendapatan daerah dapat terealisasi guna meningkatkan porsi pendapatan daerah dalam rangka memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan

--	--

belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- a. tanpa mengorbankan porsi belanja tidak langsung dengan melakukan penghematan anggaran melalui rasionalisasi belanja pegawai seperti; belanja perjalanan dinas, honorarium, makan minum, biaya rapat-rapat, belanja pemeliharaan, alat tulis kantor serta belanja lainnya yang terindikasi ganda atau pemborosan baik dalam belanja tidak langsung maupun dalam belanja langsung;
- b. mempercepat serapan anggaran melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan lebih awal, guna menghindari pelaksanaan pembangunan yang menumpuk dipenghujung tahun anggaran;
- c. meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintahan tingkat atas, untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana tugas pembantuan dan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi oleh pemerintah provinsi yang berlokasi di Kabupaten Solok;
- d. mentaati semua peraturan perundangan terkait dengan pelaksanaan anggaran agar tepat waktu dan tepat sasaran serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparat pengelola anggaran disemua level perangkat daerah;
- e. peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- f. dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- g. anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;

--	--

- h. untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- i. kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- k. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - 1. dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - 3. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 4. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - 5. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

--	--

berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pendapatan daerah diproyeksi akan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2021 namun masih sangat tergantung pada dana perimbangan. Proporsi dana perimbangan pada tahun 2021 sebesar 88,05 persen sementara Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar 11,95 persen. Proyeksi pendapatan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PENDAPATAN	1.128.678	1.174.653	1.190.972	1.250.521	1.313.047	1.378.699
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.803	116.351	71.710	75.296	79.060	83.013
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.441	14.795	17.518	18.394	19.314	20.279
2	Pendapatan retribusi Daerah	13.198	7.723	9.343	9.810	10.301	10.816
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.509	6.861	7.539	7.916	8.312	8.727
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	27.655	86.972	37.310	39.176	41.134	43.191
B	DANA PERIMBANGAN	967.170	935.902	956.834	1.004.676	1.054.909	1.107.655
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.383	18.202	14.873	15.617	16.397	17.217
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	723.676	710.963	710.963	746.511	783.837	823.029
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	229.111	206.737	230.998	242.548	254.675	267.409
	- Dana Alokasi Khusus Fisik	126.011	51.684	78.174	82.083	86.187	90.496
	- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	103.100	155.053	152.824	160.465	168.488	176.913
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.705	122.400	162.428	170.549	179.077	188.031
1	Pendapatan Hibah	3.110	11.808	53.922	56.618	59.449	62.421
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.286	43.610	45.535	47.812	50.202	52.712
3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	59.309	64.082	62.971	66.120	69.426	72.897
4	Bantuan Keuangan Dari daerah Provinsi Lainnya	-	2.900	-	-	-	-

Sumber : BKD Kabupaten Solok (2017)

Proyeksi belanja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini :

--	--

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TOTAL BELANJA	1.186.352	1.246.614	1.256.592	1.319.297	1.385.137	1.454.269
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	778.657	716.818	745.413	782.559	822.562	863.565
1	Belanja Pegawai	636.739	562.913	591.601	621.181	652.240	684.852
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	10.211	9.643	11.512	12.088	13.692	14.377
5	Belanja Bantuan Sosial	485	-	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Partai Politik	1.184	-	-	-	-	-
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.900	2.595	3.292	3.457	3.629	3.811
8	Belanja bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	125.281	139.167	136.508	143.333	150.500	158.025
10	Belanja Tidak Terduga	1.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
B	BELANJA LANGSUNG	407.695	529.796	511.179	536.738	562.575	590.704
1	Belanja Pegawai	-	33.454	35.388	37.157	39.015	40.966
2	Belanja Barang dan Jasa	202.379	274.686	241.324	253.390	265.060	278.313
3	Belanja Modal	205.316	221.656	234.468	246.191	258.501	271.426

Sumber : BKD Kabupaten Solok (2017)

Sementara itu proyeksi pembiayaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

--	--

Tabel 3.13
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.765	81.461	68.620	71.776	75.090	72.570
1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	64.765	81.461	68.620	71.776	75.090	72.570
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
7	Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Utang jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.091	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	7.091	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN	57.674	71.961	65.620	68.776	72.090	69.570

Sumber : BKD Kabupaten Solok (2017)

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021 diprediksi masih bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar 99,76 persen pada tahun 2021. Pengeluaran pembiayaan seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar 3 milyar rupiah pada tahun 2021.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung sebelumnya dan ke pos-pos mana

--	--

sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih antara total penerimaan daerah dengan berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.128.678	1.174.653	1.190.972	1.250.521	1.313.047	1.378.699
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	64.765	81.461	68.620	71.776	75.090	72.570
	Total Penerimaan	1.193.443	1.256.114	1.259.592	1.322.297	1.388.137	1.451.269
	Dikurangi :						
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	648.587	610.962	635.781	667.295	700.384	735.129
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	544.856	645.152	623.811	655.002	687.752	716.140

Sumber : BKD Kabupaten Solok (2017)

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan 24 persen tahun 2021 cenderung tidak meningkat, karena peningkatan belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat setiap tahunnya.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel 3.14 diatas, selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti terlihat pada tabel dibawah ini dan akan akan menjadi acuan dalam menyusun RAPBD Kabupaten Solok setiap tahunnya selama periode 2016-2021.

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun
2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kapasitas keuangan daerah	1.193.443	1.256.114	1.259.592	1.322.297	1.388.137	1.451.269
1	Prioritas I wajib dan mengikat	648.587	610.962	635.781	667.295	700.384	735.129
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	417.705	439.640	440.857	462.804	485.848	507.944
3	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	127.151	205.512	182.954	192.198	201.904	208.196
	Surplus Anggaran Riil/berimbang	0	0	0	0	0	0

Sumber : BKD Kabupaten Solok (2017)

--	--

Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas yaitu prioritas I, II dan III yaitu :

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah.

Prioritas II : direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Solok, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrstruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.

Prioritas III : dialokasikan untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung untuk mendukung program prioritas di kabupaten yang bukan kewenangan kabupaten seperti untuk bantuan keuangan kepada desa/nagari, belanja hibah dan bantuan sosial.

Alokasi kerangka pendanaan kapasitas riil keuangan Kabupaten Solok tahun 2016-2021. Secara nominal pendanaan prioritas I, II dan III mengalami fluktuasi yang disebabkan peningkatan belanja wajib dan mengikat lebih besar dari peningkatan pendapatan. Dari Tabel 3.16 dapat dilihat proyeksi pendanaan tahun 2021 untuk prioritas I sebesar 59,52 persen, prioritas II sebesar 39,45 persen dan prioritas III sebesar 1 persen.

Tabel 3.16

**Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)**

No	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prioritas I	648.587	610.962	635.781	667.295	700.384	735.129
2	Prioritas II	417.705	439.640	440.857	462.804	485.848	507.944
3	Prioritas III	127.151	205.512	182.954	192.198	201.904	208.196
	Total	1.193.443	1.256.114	1.259.592	1.322.297	1.388.137	1.451.269

Sumber : BKD Kab. Solok (2017)

--	--

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan dan kesenjangan antara apa yang kita ingin di capai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan di buat. Dari gambaran umum kondisi daerah pada Bab II dapat diketahui berbagai aspek yang mengalami kemajuan dalam lima tahun terakhir yang menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Solok pada tahun-tahun berikutnya. Disamping keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai tahun 2015, Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang harus ditangani melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program secara berkelanjutan untuk periode 5 tahun kedepan.

4.1.1 Pendidikan

- Rendahnya angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/ MTsN dan SMP/ MTsN ke SMA/SMK/ MA
- Masih rendahnya angka Rata-rata Lama sekolah
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

4.1.2 Kesehatan Masyarakat

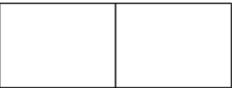
- Masih rendahnya Angka Harapan Hidup
- Tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu
- Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk
- Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan
- Belum merata sarana dan prasarana kesehatan

4.1.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemukiman

- Belum memadai sarana dan prasarana persampahan
- Rendahnya cakupan sanitasi dan air bersih yang layak
- Masih tingginya pencemaran lingkungan

4.1.4 Kualitas Penduduk .

- Masih rendahnya pengarusutamaan gender



- Masih tingginya Total Fertility Rate (TFR)

4.1.5 Perekonomian Masyarakat

- Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor unggulan daerah (Pertanian dan pariwisata)
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas insfrastruktur
- Tingginya tingkat pengangguran
- Tingginya angka kemiskinan,
- Belum kondusif Iklim investasi
- Ekonomi kerakyatan (UMKM/IKM) yang belum berkembang
- Masih rendahnya kepercayaan terhadap Koperasi
- Masih rendahnya daya saing IKM

4.1.6 Ketahanan Pangan

- Stabilitas ketersediaan pangan
- Masih rendahnya kualitas pangan
- masih rendahnya konsumsi pangan yang beragam
- belum optimalnya pola distribusi dan aksesibilitas pangan

4.1.7 Kebencanaan

- Masih rendahnya kesiapsiagaan bencana
- Masih kurangnya informasi kebencanaan
- Masih kurang nya sarana dan prasarana kebencanaan

4.1.8 Tata Kelola Pemerintahan

- Masih rendahnya Indek Kepuasan Masyarakat
- Masih rendah nya Opini BPK terhadap Pengelolaan keuangan
- Masih rendah Nilai Reformasi Birokrasi
- Belum optimalnya penggalian penerimaan PAD
- Masih fluktuatif nilai evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah

4.1.9 Pengamalan nilai Agama, Adat dan Budaya

- Menurunnya pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat (data aktifitas remaja masjid)
- Masih tingginya angka kriminalitas



4.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berdasarkan lingkup tersebut, maka isu strategis Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

4.2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui Human Development Index dilanjutkan dengan penancangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Pada Sustainable Development Goals(SDG's) ini terdapat beberapa sasaran yakni :

- 1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
- 2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.

--	--

- 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
- 4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
- 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
- 10. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 11. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 12. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 13. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Sebagai agenda global, Sasaran SDG's tersebut harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah sesuai dengan karakteristik dan kewenangan daerah.

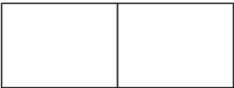


4.2.2 Integrasi Ekonomi Kawasan dan Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. Telah ditandatanganinya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), AFTA, APEC, dan lain-lain menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Integrasi ekonomi kawasan seperti MEA akan memberikan peluang diantaranya :

- a. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.
- b. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan diwilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah.
- c. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.
- d. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.
- e. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara.

Sebaliknya, integrasi ekonomi kawasan dapat menjadi ancaman jika sumber daya suatu negara/daerah tidak dapat bersaing, sehingga peningkatan daya saing SDM merupakan hal yang utama untuk menjadi prioritas.



4.2.3 Akses Masyarakat terhadap Kebutuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur dari kemampuan akses terhadap kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses tersebut dapat dilihat dari perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Akses pelayanan dasar Kabupaten Solok sampai tahun 2015 dapat dilihat dari masih rendahnya Angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk SD/MI ke SMP/MTsN atau SMP/ MTsN ke SMA/SMK / MA menjadi fokus penting dalam potret pendidikan di Kabupaten Solok. Pendidikan Dasar 12 Tahun merupakan Program Nasional yang harus di dukung oleh setiap elemen pemerintah baik propinsi ataupun Kab/kota. Angka melanjutkan Pendidikan ini akan berpengaruh terhadap angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang merupakan komponen penting pembentuk Indek pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi Pendidikan. Tinggi rendahnya IPM ini akan menentukan tinggi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia daera

Untuk mendukung keberhasilan Pendidikan, kinerja pendidikan yang telah mendapatkan perhatian pada periode sebelumnya adalah peningkatan kualitas Tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, namun kedepan perlu di tingkatkan dan dilakukan pendekatan dengan startegi lain, sehingga angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dapat di tingkatkan. Selain itu faktor yang juga berpengaruh adalah tinggi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Di beberapa daerah yang Pendapatan perkapita nya lebih tinggi, namun tidak di barengi dengan tinggi nya minat untuk bersekolah. Di beberapa daerah lainnya justru keterbatasan biaya menjadi faktor menghambat untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.

Disisi dimensi layanan kesehatan, Kabupaten Solok masih perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan ke nagari-nagari pelosok melalui penguatan puskesmas dan poskesri. Selain itu, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. Masih rendah

--	--

nya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dapat dilihat dari indikator usia harapan hidup Kabupaten Solok yang masih dibawah Angka rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

4.2.4 Pengembangan Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan dan UMKM

Kondisi geografi Kabupaten Solok yang di dominasi oleh Lahan pertanian, manjadikan kabupaten Solok mempunyai potensi dalam pengembangan sektor Pertanian untuk mendukung perekonomian masyarakat. hal ini terlihat lebih dari besarnya kontribusi Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Solok sebesar 38,64% pada tahun 2015. Namun angka ini menunjukkan tren yang menurun jika di bandingkan awal periode sebelumnya tahun 2011 sebesar 45,01%. Penurunan ini di sebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya 1) adanya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan pertanian pangan (sawah) ke perumahan atau lapangan usaha lainnya, 2) kecenderungan masyarakat beralih ke lapangan usaha lain, seperti perdagangan, Pertambangan

Melirik potensi perekonomian lainnya, Kabupaten Solok mempunyai Potensi Pariwisata yang sangat besar. Keberadaan 5 danau, alam yang indah, lahan pertanian yang luas, dan juga beberapa peninggalan adat, budaya dan agama, sangat memungkinkan untuk pengembangan objek wisata alam, budaya, religi dan agrowisata. Apalagi di dukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat untuk berwisata saat ini. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa objek wisata dikabupaten Solok belum terkekola dengan baik dan potensi pariwisata belum tergarap secara maksimal. Pemerintah dalam upaya peningkatan dan pengembangan Pariwisata daerah sudah melakukan pemenuhan dan peningkatan Sarana dan prasana pariwisata, namun perlu di tingkatkan. Selain itu peran serta stakeholder dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kenyamanan wisatawan juga sangat di butuhkan.

Pariwisata kabupaten Solok di harapkan juga akan mendukung program pengambangan sektor Pariwisata propinsi dan Nasional. Upaya ini perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan Pendapatan

--	--

masyarakat dan daerah dari sektor pariwisata yang nanti nya akan melibatkan berbagai sektor diantaranya sektor perdagangan, UMKM. UMKM juga menunjukkan pertumbuhan jumlah yang signifikan, namun belum di barengi dengan peningkatan daya saing.

4.2.5 Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Bebas Korupsi

Pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi informasi merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Paradigma pelayanan instansi pemerintah yang lama dan berbelit harus diatasi dengan penerapan teknologi informasi dalam layanan. Banyaknya pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

--	--

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Solok tahun 2016-2021, yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”

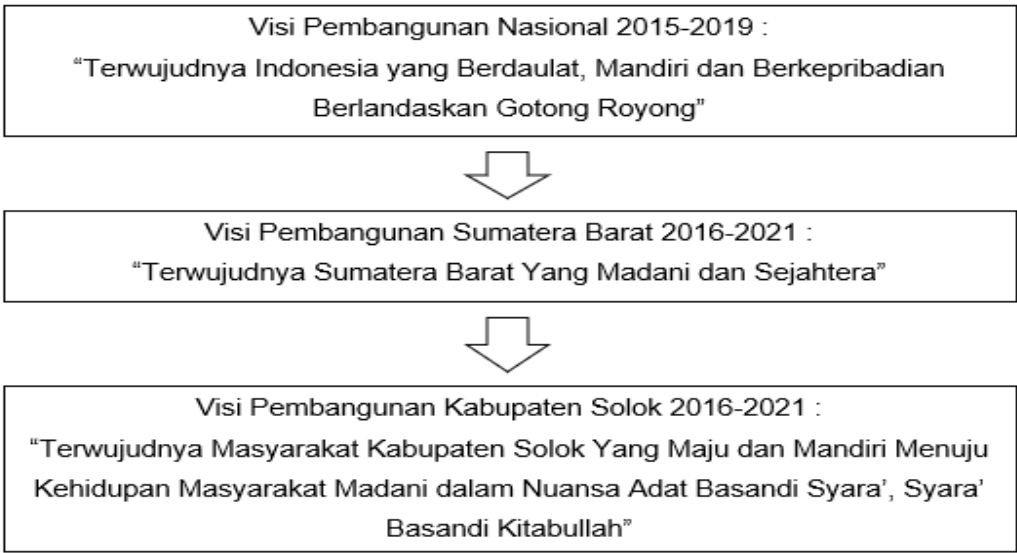
Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju : Artinya kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lingkungan yang aman.
- Mandiri : Adalah kondisi masyarakat yang dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang terjadi.
- Madani : Adalah kondisi masyarakat dengan peradaban tinggi berlandaskan nilai-nilai moral, norma hukum, norma sosial yang ditopang oleh keimanan sesuai dengan filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”



Visi Kabupaten Solok tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera”. Keterkaitan Visi Kabupaten Solok dengan Visi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.1
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kabupaten Solok



Visi Kabupaten Solok yang “maju” selaras dengan visi pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan Sumatera Barat yang sejahtera yang menggambarkan kemakmuran masyarakat. Visi “mandiri” selaras dengan visi nasional mandiri dan visi Sumatera Barat sejahtera yang menggambarkan berdayanya ekonomi lokal dan rendahnya tingkat ketergantungan terhadap daerah lain. Visi “madani” selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong-royong dan visi Sumatera Barat

--	--

madani, yang menggambarkan masyarakat memegang teguh nilai-nilai agama, norma sosial, taat hukum, demokratis dan menghargai pluralisme.

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan definisi tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Mensukseskan program wajib belajar 12 Tahun**
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang baik dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik serta manajemen pendidikan yang sesuai standar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia.
- 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat**
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang sehat dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, tenaga kesehatan yang merata, pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mewujudkan kenyamanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penataan ruang yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat.
- 3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai**
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh infrastruktur yang semakin baik dan merata.
- 4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak,**

--	--

Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya

Misi ini dimaksudkan untuk perubahan sikap mental yang sesuai dengan nilai-nilai agama, adat dan budaya lokal yang dapat menjadi benteng dari pengaruh negatif globalisasi dan degradasi moral dan didukung lembaga sosial kemasyarakatan yang berdaya.

5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel serta didukung aparatur yang profesional sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah meningkat.

Visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama lima tahun yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan yakni :

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Ekonomi Kerakyatan
- 4. Pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021, keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut :

--	--

Tabel 5.1
Keselarasan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan
RPJMD Kabupaten Solok

No	Misi RPJMN 2015-2019	Misi RPJMD Sumbar 2016-2021	Misi RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan		
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum		
3	Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim		
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Mensukseskan program wajib belajar 12 Tahun
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
		Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
		Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya

--	--

5.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program dan kegiatan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan visi dan misi yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun mendatang. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

--	--

Tabel 5.2 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021												
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah												
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian					Kondisi akhir
							2016	2017	2018	2019	2020	
1	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun	Mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,57	7,58	7,59	7,6	7,61	7,62	7,63
			Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
				- PAUD	%	75,22	76,85	78,48	78,71	80	81,71	86,71
				- SD/MI/Paket A	%	110,95	111,79	112,63	114,65	114,93	115,22	115,5
				- SMP/MTSN/Paket B	%	93,25	84	85,53	86,64	87,75	88,89	90
				Angka Partisipasi Murni (APM)								
				- SD/MI/Paket A	%	NA	NA	NA	96,09	96,56	97,03	97,50
				- SMP/MTSN/Paket B	%	NA	NA	NA	71,54	75,61	79,68	83,75
			Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Nilai rata-rata Ujian Nasional UN								
				- SD/MI	Nilai	69,41	70,58	71,75	72,56	73,38	74,19	75,00
				- SMP/MTSN/Paket B	Nilai	51,14	49,97	48,60	49,77	51,37	52,97	55,00
				Tingkat kelulusan								
				- SD/MI	%	99	100	100	100	100	100	100
				- SMP/MTSN	%	99	100	100	100	100	100	100
				Persentase sekolah yang terakreditasi A								
				- SD/MI	%	55	60	65	70	85	90	95
				- SMP/MTSN/Paket B	%	44	49	54	59	64	69	74
				Persentase penerapan SUBP								
				- SD/MI/Paket A	%	NA	NA	NA	24	45	66	87
				- SMP/MTSN/Paket B	%	NA	NA	24	45	66	87	90
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat		Usia Harapan Hidup	Tahun	67,35	67,50	67,70	67,90	68,10	68,30	68,50
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu	%	0,001081582	0,0017236	0,000579374	0	0	0	0
				Angka kematian bayi	%	16,47	13,63	12,17	10,7	9,24	7,77	6,31
				Persentase balita gizi buruk	%	0,0245	0,039	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian					Kondisi akhir
							2016	2017	2018	2019	2020	
			Meningkatnya kualitas penduduk	Persentase Penurunan PMKS	%	35	40	45	50	55	60	65
				Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah anak	2,74	2,72	2,70	2,68	2,66	2,63	2,60
				Pertumbuhan penduduk	%	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
				Rasio KDRT	%	0,01212	0,012	0,01175	0,01150	0,01125	0,011	0,0108
				Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,73	95,74	95,75	95,76	95,77	95,78	95,79
		Meningkatkan kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	NA	NA	NA	60	61	62	63
				Cakupan Rumah Tangga dengan air minum layak	%	64,42	68,4	70,25	72,4	73,25	74	75
				Cakupan Rumah Tangga dengan sanitasi layak	%	67,54	68,4	70,4	71,35	73,5	74,3	75
				Level ketahanan daerah terhadap bencana	Level	2	2	2	2,5	3	3,5	3,5
				persentase kawasan perumahan dan lingkungan yang tertata	%	15	18	21	25	30	35	40
3	Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	Meningkatkan perekonomian masyarakat		Pertumbuhan ekonomi	%	5,43	5,45	5,46	5,47	5,48	5,49	5,5
				PDRB perkapita	Juta/tahun	24,97	26,04	27,21	28,52	29,96	31,53	33,29
			Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Indeks Gini	Indeks	0,29	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
				Angka kemiskinan	%	10	9,75	9,5	9,25	9	8,75	8,5
				Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,93	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3
			Meningkatnya nilai investasi dan kontribusi sektor unggulan	Nilai investasi	Milyar rupiah	NA	180	189	198,45	208,37	218,79	229,73
				PDRB sektor Akomodasi dan makan minum	Milyar rupiah	57	62	68	72	76	80	85

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian					Kondisi akhir
							2016	2017	2018	2019	2020	
				PDRB Sektor Pertanian, kehutan dan perikanan	Milyar rupiah	3.141	3.234	3.364	3.494	3.628	3.768	3.913
			Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	Kg/kapita/thn	529,80	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	608,65
				Skor PPH	Skor	80,01	81,5	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi	Persentase insfrastruktur pendukung di kawasan pertumbuhan ekonomi	%	NA	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
4	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Meningkatnya pembiasaan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Indeks Nagari Madani	Indeks	NA	NA	NA	0,55	0,6	0,65	0,75
				Angka kriminalitas	Angka	NA	614	583	554	526	500	475
				Persentase Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsi (KAN dan MUI)	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian					Kondisi akhir
							2016	2017	2018	2019	2020	
5	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	indeks	3,10	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
				Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	D	C	CC	CC	B	B	B
				Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	CC	CC	B	B	B	BB	BB
				Nilai Maturitas SPIP	Nilai	NA	2,0	3,0	3,3	3,6	3,8	4,0
				Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level	NA	NA	NA	1,5	2,3	3,5	4
				Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5	0,6	0,65	0,7	0,72	0,75	0,78
		Meningkatnya tatakelola dan kemandirian keuangan daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	4,32	4,4	4,48	4,56	4,64	4,72	4,9

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi berisi langkah dan program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Misi 1 : Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Tujuan : Mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan

Strategi :

1. Meningkatkan layanan pendidikan yang mudah dan berkualitas pada setiap jenjang pendidikan sejak usia dini
2. Meningkatkan inovasi dan penerapan teknologi pendidikan dalam pembangunan pendidikan
3. Mengembangkan budaya gemar membaca
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan



Arah kebijakan :

1. Peningkatan partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah
2. Peningkatan manajemen sekolah
3. Peningkatan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan formal dan non formal

Sasaran 2 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan pemerataan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan pengajaran nilai-nilai agama dalam pendidikan formal dan non formal

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal
3. Peningkatan pemerataan penempatan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal
4. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan formal dan non formal

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kebudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan sehat

Sasaran 1 : Meningkatnya kesehatan masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

--	--

2. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat
3. Meningkatkan standar pelayanan rumah sakit
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan
5. Meningkatkan pemahaman dan implementasi pola hidup sehat berbasis masyarakat

Arah kebijakan :

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
2. Peningkatan layanan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif
3. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
4. Peningkatan gizi masyarakat
5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
6. Peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga kesehatan
7. Peningkatan pemahaman pola hidup sehat berbasis masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas penduduk

Strategi :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dalam peningkatan kesejahteraan
2. Melakukan penguatan peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia Perkawinan
4. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
5. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak

Arah kebijakan :

1. Peningkatan peran lembaga tingkat masyarakat untuk mendukung program keluarga berencana
2. Peningkatan kemudahan akses perempuan dalam berbagai kegiatan dan peluang kerja
3. Peningkatan koordinasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana



4. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana
5. Peningkatan layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman

Strategi :

1. Meningkatkan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam
2. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi dan pemukiman yang layak
4. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat serta pemulihan daerah pasca bencana
5. Meningkatkan pengelolaan persampahan

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Penataan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

Misi 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian masyarakat

Sasaran 1 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

Strategi :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap permodalan
3. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
4. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja



5. Meningkatkan keterampilan pencari kerja
6. Meningkatkan sarana dan prasarana latihan kerja

Arah kebijakan :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin
2. Peningkatan fasilitasi kemudahan permodalan bagi masyarakat miskin
3. Peningkatan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Peningkatan sinergi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
5. Peningkatan lapangan kerja dan kewirausahaan
6. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai investasi dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Strategi :

1. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan
2. Mengembangkan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan dan jasa
4. Mendorong pengembangan usaha ekonomi kerakyatan
5. Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk UMKM
6. Meningkatkan pemasaran dan pengembangan destinasi wisata unggulan daerah
7. Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan investasi

Arah kebijakan :

1. Peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan
2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah potensial
3. Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha
4. Peningkatan pemasaran dan diversifikasi produk UMKM
5. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha UMKM
6. Pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
7. Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri
8. Pengembangan destinasi wisata unggulan

--	--

9. Peningkatan promosi dan kemudahan investasi

Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan

Strategi :

1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan
2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
3. Meningkatkan keamanan pangan

Arah kebijakan :

1. Peningkatan cadangan dan diversifikasi pangan
2. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
3. Peningkatan pengawasan pangan

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jembatan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan/transportasi

Arah kebijakan :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan
2. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan
3. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi
4. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan /transportasi

Misi 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya

Tujuan : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan pelestarian adat dan budaya

Sasaran : Meningkatnya pembiasaan nilai-nilai agama, dan pelestarian adat dan budaya



Strategi :

1. Meningkatkan peran ulama, ninik mamak, bundo kandung, lembaga-lembaga adat dan keagamaan dalam penerapan nilai-nilai adat dan budaya
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kekayaan budaya daerah

Arah kebijakan :

1. Peningkatan muatan agama dalam pendidikan formal dan non formal
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai agama, adat dan budaya
3. Peningkatan peran ulama, ninik mamak, bundo kandung, lembaga-lembaga adat dan keagamaan dalam penerapan nilai-nilai adat dan budaya
4. Peningkatan apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai agama, adat dan budaya

Misi 5 : Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah

Strategi :

1. Meningkatkan manajemen kepegawaian yang efektif, efisien dan profesional
2. Meningkatkan penataan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintahan
5. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi

Arah kebijakan :

1. Peningkatan manajemen kepegawaian yang efektif, efisien dan profesional
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara



3. Peningkatan penataan penyelenggaraan pemerintahan
4. Penguatan peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
5. Penerapan *e-goverment* dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola dan kemandirian keuangan daerah

Strategi :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan

1. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah
2. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan pendapatan Asli Daerah
3. Peningkatan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya program pendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 :

--	--

Tabel 6.1 : Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2016-2021																
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung	
			2016		2017		2018		2019		2020					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
MISI 1 : Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun																
Tujuan : Mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi																
Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan																
Indikator 1 : Rata-rata lama sekolah																
Indikator 2.a : APK PAUD																
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase kelompok/lembaga penyelenggara PAUD	100	100	3.060	100	3.232	100	2.986	100	6.471	100	6.571	100	6.671	Disdikpora	
Indikator 2b : APK SD/MI/ paket A																
Indikator 2.c : APK SMP/MTsN/ Paket B																
Indikator 3.a : APM SD/MI/Paket A																
Indikator 3.b : APM SMP/MTsN/Paket B																
Program Wajib Belajar pendidikan dasar sembilan Tahun	Persentase Penyelenggaraan Wajib Belajar pendidikan dasar sembilan Tahun	100	100	23.906	100	677	100	16.926	100	17.342	100	17.542	100	17.742	Disdikpora	
Program Pendidikan Menengah	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	100	100	10.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
Sasaran 2 : meningkatkan kualitas pendidikan																
Indikator 1.a: Nilai rata-rata ujian SD/MI/Paket A																
Indikator 2.b : Nilai rata-rata ujian SMP/MTsN/ Paket B																
Indikator 3.a: Tingkat kelulusan SD/MI / Paket A																
Indikator 3.b: Tingkat kelulusan SMP/ MTsN/ Paket B																
Indikator 4.a : Persentase sekolah terakreditasi A SD/MI/ Paket A																
Indikator 4.b: Persentase Sekolah terakreditasi A SMP/MTsN/ Paket B																
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	100	100	498	100	1.207	100	376	100	436	100	450	100	3750	Disdikpora	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	100	546	100	1.535	100	3.642	100	3.650	100	3.700	100		Disdikpora	
Program Pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan daerah	Persentase Pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan daerah	100	100	641	100	680	100	791	100	900	100	1.080	100	1.300	Dispersip	
Indikator 5 : Persentase penerapan SUBP																
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	persentase muatan lokal SUBP	NA	-	-	17	1.300	102	4.000							Disdikpora	
Program Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Karakter	persentase muatan lokal SUBP								116	4.500	130	5.000	100	5.250		
MISI 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat																
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kependudukan																
sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
Indikator 1 : Usia Harapan hidup																
Indikator 2 : Angka kematian Ibu melahirkan																
Indikator 3 : Angka kematian bayi																
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase Puskesmas rawat inap sesuai standar	7	7		7		2		1		1		1		Dinas Kesehatan	

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Standarisasi pelayanan kesehatan	persentase Puskesmas yang terakreditasi	-	2	319	7	991	8	2.000	2	1.000	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	100	8.095	100	2.615	100	6.500	100	7.000	100	7.000	100	7.000	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	50	50	115	70	31	70	120	75	130	80	140	85	150	Dinas Kesehatan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase tuberkulosis (TBC) per 100.000 penduduk	486	470	642	467	728	448	1.100	430	1.200	425	1.400	400	1.600	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita HIV/AIDS	10	27		35		24		22		19		17		
	Persentase bayi dapat Imunisasi Dasar Lengkap	75	91,5		92		100		100		100		100		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase penderita hipertensi yang ditemukan dapat dikendalikan tekanan darahnya dibawah 140 mmhg	-	100	301	100	248	100	400	100	500	100	600	100	700	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita diabetes mellitus yang ditemukan dapat dikendalikan gula darahnya	-	100		100		100		100		100		100		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	30	0	343	0	293	100	175	100	200	100	250	100	250	RSUD Arosuka
	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	0	0		0		100		100		100		100		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	0	0	5.620	100	5.494	100	5.300	100	6.000	100	6.500	100	7.000	RSUD Arosuka
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	persentase Industri Rumah Tangga (IRTP) bersertifikat	20	30	-	80	-	80	150	80	200	100	250	100	300	Dinkes
Program Pengawasan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Air Bersih yang layak	56	60	312	65	358	70	700	75	800	80	900	85	1.000	Dinkes
	Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak	30	50		55		60		65		70		75		
Program Peningkatan Pelayanan	Akreditasi RSUD Arosuka	tingkat Dasar	tingkat dasar	-	tingkat dasar	10.400	tingkat dasar	15.000	tingkat Madya	16.000	tingkat Madya	17.000	tingkat Utama	18.000	RSUD Arosuka
Indikator 4 : Persentase balita dengan gizi buruk															
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	15	13,23	93	13,22	143	13,2	350	13	400	13	450	13	450	Dinas Kesehatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penduduk															
Indikator 1: Total Fertility Rate (TFR)															
Indikator 2 : Pertumbuhan penduduk															
Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif		100	1.363	100	1.550	100	2.261	100	1.271	100	1.381	100	1.390	DPPKBP3A
Program pelayanan Kontrasepsi	Persentase akseptor yang terlayani		100	235	100	243	100	56	100	325	100	335	100	350	DPPKBP3A
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Partispasi masyarakat		100	181	100	104	100	24	100	115	100	125	100	135	DPPKBP3A
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan ketahanan keluarga		-	-	100	36	100	38	100	38	100	41	100	42	DPPKBP3A
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	% PIK - KRR		100	270	100	227	100	346	100	346	100	384	100	384	DPPKBP3A
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah pendamping kelompok bina Keluarga		100	100	100	200	100	72	100	212	100	232	100	235	DPPKBP3A

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Pelaksanaan Konseling		100	965	100	290	100	1.104	100	1.211	100	1.219	100	1.220	DPPKBP3A
Indikator 7 : Rasio KDRT															
Indikator 8: Indeks pembangunan Gender															
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100	100	393	100	674	100	813	100	951	100	1.027	100	1.030	DPPKBP3A
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penyelesaian kasus KDRT	100	100	182	100	151	100	152	100	237	100	252	100	253	DPPKBP3A
Indikator 9 : Persentase penurunan PMKS															
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang tertangani	50	100	19	100	19	100	13	100	16	100	19	100	23	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang menerima layanan dan rehabilitasi	100	100	1.835	100	1.835	100	602	100	722	100	866	100	1.040	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif	100	100	571	100	571	100	377	100	453	100	543	100	652	Dinas Sosial
Program keluarga harapan	Persentase Pendampingan PKH	100	100	366	100	366	100	157	100	189	100	227	100	272	Dinas Sosial
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup															
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman															
Indikator 10 : Indeks Kualitas lingkungan Hidup															
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan		30	231	32,5	300	35	330	37,5	360	40	400	42,5	430	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	Persentase lokasi konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air		1	264	2	100	2	120	2	140	2	160	2	180	DLH
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pelayanan persampahan		45	2503	65	3000	80	4500	90	5000	90	5200	90	5400	DLH
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas		-	-	2	150	8	1.750	8	1.500	15	2.000	15	2.000	DPRKPP
Indikator 11 : Cakupan RT dengan air minum layak															
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	64,42	68,40	7.539	70,25	4.812	72,40	8.500	73,25	8.600	74,00	8.700	75,00	8.800	DPRKPP
Indikator 12 : Cakupan RT dengan sanitasi layak															
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga bersanitasi	67,54	68,40	4.933	70,40	3.572	Rp 71,35	3.600	73,50	3.700	74,30	3.800	75,00	5.500	DPRKPP
Indikator 13 : persentase kawasan perumahan dan pemukiman yang tertata															
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ nagari	Persentase rumah layak huni		1,00	1.310	2,40	263	5,00	1.207	1,60	3.500	1,60	3.500	1,60	3.500	DPRKPP
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ nagari	Persentase infrastruktur dasar pedesaan / nagari yang terbangun		211	18.532	136	15.796	54	11.000	150	22.000	160	23.000	170	24.000	DPRKPP
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase perencanaan tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	2	1	200	2	750	1	200	1	200	1	200	1	200	Dinas PUPR

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	-	40	176	50	250	60	275	70	300	80	300	90	300	Dinas PUPR
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyediaan LPJU	-	117	7.678	127	-	132	-	137	-	142	-	147	-	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RuangTerbuka Hijau yang tersedia dan terpelihara	69,18	1	200	10	11.500	23	25.000	24	5.000	25	5.000	26	5.000	Dinas PUPR
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	868	100	838	100	1.375	100	1.375	100	1.603	100	1.605	SATPOLPP dan DAMKAR
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas	100							100		100	285	100	285	SATPOLPP dan DAMKAR
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100	26	100	53	-	-	100	-	100	106	100	106	SATPOLPP dan DAMKAR
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan sistim keamanan di lingkungan masyarakat	100	100	159	100	68	100	15	100	15	100	105	100	110	SATPOLPP dan DAMKAR
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Wilayah Manajemen Kebakaran				44,44	1.549	55,55	1.743	55,56	1.743	66,67	4.484	66,67	4.484	SATPOLPP dan DAMKAR
Indikator 14 : level ketahanan daerah terhadap bencana															
Program Pencegahan Dini	Persentase kelompok siaga bencana yang aktif														BPBD
Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase penanganan bencana dalam masa tanggap darurat	100	100												BPBD
Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi	100	100	45	-	-	-	-	100	50	100	60	100	70	BPBD
MISI 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai															
Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian masyarakat															
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor unggulan															
Indikator 1 : Pertumbuhan ekonomi															
Indikator 2 : PDRB perkapita															
Indikator 3 : Indeks Gini															
Indikator 4 : Angka kemiskinan															
Indikator 5 : Tingkat pengganguran terbuka															
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kualitasnya		5	111	6	265	6	92	6	815	6	2.165	7	3.185	DPMPPTSPNAKER
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja		3	36	5	287	7	685	9	1.368	10	1.715	12	1.670	DPMPPTSPNAKER
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terfasilitasinya Pemberian Perlindungan Hukum/BPJS Ketenagakerjaan				1	69	1	3	1	13	1	25	1	50	DPMPPTSPNAKER
Indikator 6 : Nilai Investasi															
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi			190		246		281		342		1.137		1.259	DPMPPTSPNAKER
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor		5	161	6	374	7	78	8	100	9	492	10	495	DPMPPTSPNAKER

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Indikator 7 : PDRB sektor akomodasi, makan dan minum															
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan kelembagaannya koperasi		4	524			85	181	238	865	238	865	250	945	DKUKMPP
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang dibantu dalam penguatan kelembagaan		400	500	412	3.564	300	521	90	550	90	550	100	1.000	DKUKMPP
Program Penumbuhan Koperasi Sektor Riil	Jumlah koperasi sektor riil yang tumbuh				110	443			3	500	3	500	4	750	DKUKMPP
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang mempunyai izin usaha		150	96	900	337	25	42	1.365	800	1.365	800	1.674	900	DKUKMPP
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat daya saingnya		200	367	339	1.065			70	150	70	150	100	250	DKUKMPP
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase destinasi yang dikembangkan		3,4	2.410	20,8	8.384	24,2	1.686	20,5	8.242	14,6	8.242	12,5	9.067	Disbudpar
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	% akumulasi pertumbuhan industri pariwisata		10	342	25	628	50	282	70	1.280	85	1.280	100	1.408	Disbudpar
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pameran dan event promosi yang dilaksanakan		5/11	2.586	5/11	2.295	5/11	1.043	5/11	2.900	5/11	2.900	5/11	3.190	Disbudpar
Indikator 8 : PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan															
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	5,39	15,35	1.279	16,86	2.373	20	8.505	20,01	9.956	5	11.450	5	11.450	Dinas Perikanan dan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	persentase peningkatan Produksi perikanan perairan umum	3,27	4,78	468	13,3	221	5,01	1.100	8,95	1.250	8,94	1.738	8,94	1.738	Dinas Perikanan dan Pangan
Sasaran 2 : Meningkatkan ketahanan Pangan															
Indikator 1 : Ketersediaan pangan utama															
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian			4.156		3.604		1.399		5.370		5.781		6.186	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Produktifitas Padi	6	6		6		6		6		6		6		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Persentase Luas Pertanaman padi sawah Yang Menggunakan benih unggul bersertifikat	36	40	2.312	49	4.243	57	6.056	59	4.318	62	3.149	65	3.417	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Ternak	3	5	-	5	1.927	3	1.286	3	3.228	3	3.925	3	4.258	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Persentase Pertambahan Kelompok Tani Yang Menggunakan Teknologi Pertanian	4	41	1.245	188	3.366	4	-	4	1.282		1.198	4	1.239	Dinas Pertanian

--	--

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung	
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Kelompok Tani Yang Telah Melakukan Agribisnis	4	5	540	5	1.513	5,00	725	5	3.248	5	3.189	5	3.689	Dinas Pertanian	
	Persentase kelompok tani yang menerapkan standarisasi produk	2,00	4,00		2,00						2,00	-	2,00			
	Cakupan kelompok usaha agribisnis yang dikembangkan	-	-		-				1		1		1			
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Pameran/promosi dan Perlombaan Hasil Pertanian yang diadakan/ diikuti	10	10	93	9	444	10	1.780	10	525	10	1.693	10	658	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Pameran/promosi dan Perlombaan Hasil Peternakan yang diadakan/ diikuti	2	2		2	-	2	68	2	282	2	250	2	250	Dinas Pertanian	
Indikator 2 : Skor PPH																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Fluktuasi harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen (coefisien variasi)	6,9	5,8		<10	2.845	<10	4.527	<10	4.830	<10	5.234	<10	5.234	Dinas Perikanan dan Pangan	
	Skor pola pangan harapan	80,1	81,1		82,3		82,5		83		84		84			
	Ketersediaan pangan utama per kapita	529,8	547,97		592,36		567,14		580,64		594,47		594,47			
	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat		90		90		90		90		90		90			
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi																
Indikator 1 : Persentase insfrastruktur pendukung di kawasan pertumbuhan ekonomi																
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase keselamatan transportasi darat dan danau	60	63	692	66	1.150	69	731	72	1.000	75	1.200	78	1.400	Dinas Perhubungan	
Program pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan mantap	693,77	28	40.252	15	45.000	15	40	15	44.000	15	44.000	15	48.000	DPUPR	
	Jembatan Baik	121	130	6.900	134	7.664	136	7.686	138	3.248	140	4.690	142	5.072		
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas Areal Irigasi yang ber kondisi baik	14.875	11.190	30.979	12.590	34.100	13.990	31.120	15.390	31.190	16.790	25.210	18.190	25.300	DPUPR	
MISI 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama																
Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama, adat dan budaya																
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat																
Indikator 1 : Indeks Nagari Madani																
Indikator 2 : Angka kriminalitas																
Indikator 3 : persentase lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsi nya 1. MUI 2. KAN																
Program peningkatan nilai-nilai agama dan kebudayaan	Persentase masjid paripurna			6.428		6.690		4.452				4.452		4.452	Sekretariat Daerah	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya	100	100	599	100	1.544	100	1.267	100	650	100	715	100	786	Disbudpar	

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan nilai budaya	100	100	273	100	24		-	100	160	100	176	-	-	Disbudpar
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	100	100	728	100	-		-	100	1.620	100	1.782	100	1.960	Disbudpar
MISI 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)															
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik															
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tranparansi penyelenggaraan pemerintahan															
Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan															
Program Pengembangan perumahan dan Permukiman	Persentase peningkatan sarana perkantoran yang dibangun		10	6.500	10	9.253	10	9.500	10	10.000	10	11.000	10	13.000	DPRKPP
	Persentase peningkatan sarana perkantoran yang dipelihara		5	6.500	5	9.253	5	9.500	5	10.000	5	11.000	5	13.000	
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penatausahaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah		10	3.570	10	5.871	10	4.407	10	4.141	10	4.475	10	4.199	DPRKPP
Program Penataan Administrasi Kependudukan	% penataan administrasi kependudukan	100	100	1.161	100	2.386	100	1.161	100	1.165	100	1.750	100	1.800	Disdukcapil
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terwujudnya peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	4.300	5.000	694	2.000	353	6.175	670	6.700	550	6.700	650	6.800	600	Kantor Kesbangpol
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	1	5	-	-	1	50	1	50	1	75	1	75	Kantor Kesbangpol
Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terwujudnya pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	1	342	1	673	1	205	1	200	1	300	1	250	Kantor Kesbangpol
Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase Terlaksananya pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa				100	858	100	228	100	1.000	100	1.105	100	1.300	Diskominfo
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Pelaksanaan kerjasama informasi dan media massa						100	220	100	610	100	610	100	600	Diskominfo
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	373	100	289	100	487	100	325	100	365	100	420	Kantor Kesbangpol
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	83	84	1.200	85	1.562	85	484	86	1.495	86	1.644	87	1.222	BKPSDM
Program penataan organisasi pelayanan publik	Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran							25	100	25	100	25	100	25	Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dikelola dengan baik	90	90	1.862	90	238	90	263	90	263	95	263	95	263	Sekretariat Daerah
Indikator 2 : Nilai Reformasi Birokrasi															
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perbaikan sistem administrasi kearsipan								100	130	100	150	100	160	Dispersip
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip yang terselamatkan dan terlestarikan	100	100	204	100	325	100	910	100	1	100	975	100	990	Dispersip
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan				100	144	100	144	100	120	100	130	100	140	Dispersip

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Indikator 3 : Nilai SAKIP Kabupaten															
Program peningkatan fasilitasi kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terfasilitasinya penyusunan dokumen dan publikasi perencanaan	100	100	185	100	237	100	175	100	184	100	193	100	203	Barenlitbang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelenggaraan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah	100	100	1.441	100	1.725	100	1.537	100	1.614	100	1.695	100	1.779	Barenlitbang
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase terfasilitasinya penyusunan dokumen dan publikasi perencanaan	-					100	32	100	34	100	35	100	37	Barenlitbang
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dlam dokumen perencanaan	80	80	96	85	190	85	64	85	67	85	71	90	74	Sekretariat Daerah
Indikator 4 : Nilai Maturitas SPIP															
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIPnya	1.771	100	2.140	100	2.140	100	146	100	295	100	323	100	355	Inspektorat, Sekretariat Daerah
	persentase Auditor/ P2UPD yang Memiliki Sertifikasi Teknis Pengawasan	212	100	365	100	365	100	-	100	365	100	401	100	442	Inspektorat
Indikator 5 : Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)															
Program pengelolaan infrastruktur Dasar dan Aplokasi E-Government	Persentase Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur dan aplikasi e-government						100	847	100	1.318	100	1.533	100	1.686	Diskominfo
Program e-government	Persentase penyelenggaraan dan pengembangan e-government								100	200	100	300	100	400	Diskominfo
Program Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase penyelenggaraan dan pengembangan e-Government								100	200	100	300	100	400	Diskominfo
Program pengembangan Smart City	Persentase ketersediaan pengembangan Smart City								100	1.200	100	1.200	100	1.200	Diskominfo
Program persandian dan keamanan informasi	Persentase pelaksanaan keamanan informasi									500	100	600	100	700	Diskominfo
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pembangunan sistem administrasi elektronik									1.215	100	1.479	100	900	Diskominfo
Program peningkatan akses dan kuantitas informasi publik	Persentase Peningkatan akses dan kuantitas informasi publik									1.000	100	1.000	100	1.200	Diskominfo
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Pelaksanaan kerjasama informasi dan media massa									840	100	1.000	100	1.200	Diskominfo
Indikator 6 : indeks desa membangun															
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Pedesaan	Persentase Organisasi pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan	100	100	3.871	100	3.871	100	1.617	100	3.000	100	3.000	100	3.000	DPMN
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan / Nagari	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Nagari	100	100	-	100	-	100	-	100	1.500	100	1.500	100	1.500	DPMN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari/Desa	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	224	100	224	100	205	100	500	100	500	100	500	DPMN
Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan	persentase taat kelola keuangan dan aset nagari	100	100	322	100	322	100	-	100	250	100	250	100	250	DPMN
Sasaran 2 : Meningkatkan tata kelola dan kemandirian keuangan daerah															

--	--

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam juta)										Kondisi akhir RPJMD (2021)		Perangkat Daerah penanggung
			2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Indikator 1 : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan															
Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		89	6.620		8.845	100	3.635	100	11.314	100	11.950	100	13.145	BKD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penurunan temuan BPK dalam pengelolaan keuangan OPD	5	5	1.013	5	1.178	5	459	5		5	459	5	459	Sekretariat Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Persentase Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Aset Nagari	100	100	-	100	-	100	201	100	300	100	300	100	300	DPMN
Indikator 2 : persentase PAD terhadap pendapatan daerah															
Program pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah	Persentase peningkatan skala usaha UMKM	2	2	429	2	429	2	72			2	72	2	72	Sekretariat Daerah
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	5	5	252	5	252	5	17			5	17	5	17	Sekretariat Daerah
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	90	90	200	90	200	90	200	900	200	90	200	90	200	Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintahan umum	90	90	761	90	1.963	90	1.700	90	1.700	90	1.700	90	1.700	Sekretariat Daerah
Program kerjasama pembangunan	Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik			92		92		4				4		4	Sekretariat Daerah

--	--

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok

Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

No	KAPASITAS RIIL/BELANJA DAERAH	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	1.175.452	1.201.001	1.231.339	1.229.326	1.233.475	1.234.956
	TOTAL BELANJA	1.186.352	1.246.614	1.256.592	1.319.297	1.385.137	1.454.269
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	778.657	716.818	745.413	782.559	822.562	863.565
1	Belanja Pegawai	636.739	562.913	591.601	621.181	652.240	684.852
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	10.211	9.643	11.512	12.088	13.692	14.377
5	Belanja Bantuan Sosial	485	-	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Partai Politik	1.184	-	-	-	-	-
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.900	2.595	3.292	3.457	3.629	3.811
8	Belanja bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	125.281	139.167	136.508	143.333	150.500	158.025
10	Belanja Tidak Terduga	1.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
B	BELANJA LANGSUNG	407.695	529.796	511.179	536.738	562.575	590.704
1	Belanja Pegawai	-	33.454	35.388	37.157	39.015	40.966
2	Belanja Barang dan Jasa	202.379	274.686	241.324	253.390	265.060	278.313
3	Belanja Modal	205.316	221.656	234.468	246.191	258.501	271.426

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok (Tahun 2017)

Selanjutnya program proritas yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 tersaji pada tabel 7.2 dibawah ini :

--	--

Tabel 7.2 : Program Per Urusan serta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2016-2021																
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
BELANJA LANGSUNG				407.695		529.796		511.179		536.738		562.575		590.704		
URUSAN WAJIB																
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PENDIDIKAN															Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100	100	424	100	664,7	100	2.152	100	2.420	100	2.553	100	2.808		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam	100	100	289	100	338,7	100	462	100	513	100	533	100	586		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	565	-	25	-	-	-	-	-	-	-			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang	100	100	255	100	161	100	22	100	42	100	42	100	46		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase kelompok/lembaga	100	100	3.060	100	3.519	100	2.986	100	6.471	100	6.571	100	6.771		
Program Wajib Belajar 9 Tahun	Persentase Penyelenggaraan Wajib	100	100	23.906	100	677	100	16.926	100	17.342	100	17.542	100	17.742		
Program Pendidikan Menengah	Persentase Penyelenggaraan	100	100	10.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Penyelenggaraan	100	100	342	100	436	100	72	100	75	100	80	100	1.056		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	100	100	498	100	1.207	100	376	100	436	100	450	100	475		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	100	546	100	1.535	100	3.642	100	3.650	100	3.700	100	3.750		
Program Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Karakter	Jumlah sekolah yang melaksanakan SUBP	100	-	-	17	1.300	102	4.000	116	4.500	130	5.000	150	5.250		
URUSAN KESEHATAN															Dinas	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	367	100	601	100	8.936	100	1.100	100	1.100	100	1.100		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam	100	100	352	100	316	100	1.159	100	1.100	100	1.100	100	1.100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	109	100	70	100	120	100	200	100	250	100	300		

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.						
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	NA	BB	134	BB	108	B	87	B	200	B	200	B	250						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	108	172	42.634	237	38.820	234	48.199	232	55.000	230	60.000	225	65.000						
	Angka kematian bayi	15	25		25		33		32		31		30							
	Jumlah Puskesmas rawat inap sesuai standar	7	7		7		2		1		1		1							
Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	-	2	319	7	991	8	1.596	2	1.000	-	-	-	-						
Program Obat dan Pembekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	100	8.095	100	2.615	100	4.459	100	7.000	100	7.000	100	7.000						
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	50	50	115	70	31	70	28	75	130	80	140	85	150						
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	15	13,23	93	13,22	143	13,2	201	13	400	13	450	13	450						
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun)	26	26				25		38,06				0				0		0	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase tuberkulosis (TBC) per 100.000	486	470	642	467	728	448	266	430	1.200	425	1.400	400	1.600						
	Jumlah penderita	10	27				35				24					22		19		17
	Persentase bayi dapat Imunisasi Dasar Lengkap	75	91,5				92				100					100		100		100
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase penderita hipertensi yang ditemukan dapat dikendalikan tekanan darahnya dibawah 140 mmhg	-	100	301	100	248	100	169	100	500	100	600	100	700						
	Persentase penderita diabetes mellitus yang ditemukan dapat dikendalikan gula darahnya	-	100				100				100					100		100		
	Regulasi Kawasan Tanpa Rokok	-	-				1				1					-		-		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	30	0	343	0	293	100	348	100	200	100	250	100	250	RSUD Arosuka					
	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	0	0				0				100					100		100		

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang medapat jaminan kesehatan	0	0	5.620	100	5.494	100	5.391	100	6.000	100	6.500	100	7.000	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana RSUD	100	60		70	3.130	80	6.042	80	7.000	90	8.000	90	9.000	
Program Pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	100	100		100	400	100	100	100	350	100	400	100	450	
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Jumlah Industri Rumah Tangga (IRTP) bersertifikat	20	30	-	80	-	80	154	80	200	100	250	100	300	
Program Pengawasan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Air	56	60	312	65	358	70	700	75	800	80	900	85	1.000	
	Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak	30	50		55		60		65		70		75		
Program Pengembangan, Peningkatan, Pemantapan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mengumpulkan data dengan lengkap dan tepat waktu	-	5	79	3	96	3	27	3	125	3	150	2	175	
Program Peningkatan Pelayanan	RSUD terakreditasi	-	-	-	-	10.400	1	143.200	-	16.000	-	17.000	-	18.000	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100	100	316	100	578	100	2.851	100	48	100	52	100	55	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	814	100	263	100	316	100	356	100	382	100	439	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	4	4	20	4	20	4	100	4	40	4	45	4	48	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	5	5	46	5	35	5	17	5	50	5	55	5	60	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	2	1	200	2	750	1	556	1	200	1	200	1	200	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	-	40	176	50	250	60	-	70	300	80	300	90	300	
Program Pemanfaatan Ruang	Penyediaan LPJU	-	117	7.678	127	-	132	28.586	137	-	142	-	147	-	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dan terpelihara	69,18	1	200	10	11.500	23	253	24	5.000	25	5.000	26	5.000	
Program pembangunan Jalan dan	Panjang jalan mantap	693,77	28	40.252	15	45.000	15	30.460	15	44.000	15	44.000	15	48.000	
	Jembatan Baik	121	130	6.900	134	7.664	136	7.686	138	3.248	140	4.690	142	5.072	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jalan yang terpelihara	693,77	362	10.617	362	16.951	260	16.523	260	18.250	260	18.250	260	19.200	
	jumlah jembatan yang terpelihara	168	4	450	10	349	4	1.500	4	1.600	4	1.600	4	1.700	
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah Alat berat yang disediakan		1	500	1	1.750	1	616	1	750	1	750	1	750	
	Jumlah Alat labor yang di sediakan		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas Areal Irigasi yang berkondisi baik	14.875	11.190	30.979	12.590	34.100	13.990	21.846	15.390	31.190	16.790	25.210	18.190	25.300	
Program Pengembangan , Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sungai	70	2	2.000	2	1.234	3	1.105	3	2.000	3	2.000	3	2.000	
	Jumlah Rehabilitasi embung dan bangunan penampungan	77	2	2.000	2	1.234	3	2.000	3	2.000	3	2.000	3	2.000	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100	197	100	2.107	100	1.094	100	1.203	100	1.324	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100	25	100	294	100	289	100	318	100	350	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu				4	5	4	10	4	44	4	48	4	53	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu				90	44	5	25	5	220	5	242	5	266	
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas		-	-	2	150	8	1.750	8	1.500	15	2.000	15	2.000	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	64,42	68,40	7.539	70,25	4.812	72,40	10.391	73,25	8.600	74,00	8.700	75,00	8.800	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga bersanitasi	67,54	68,40	4.933	70,40	3.572	Rp 71,35	4.139	73,50	3.700	74,30	3.800	75,00	5.500	
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ nagari	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan terhadap masyarakat kurang mampu		1,00	1.310	2,40	263	5,00	16.902	1,60	3.500	1,60	3.500	1,60	3.500	
	Jumlah infrastruktur dasar pedesaan / nagari yang terbangun		211	18.532	136	15.796	54	11.000	150	22.000	160	23.000	170	24.000	
Program Pengembangan perumahan dan Permukiman	Persentase peningkatan sarana perkantoran yang dibangun		10	6.500	10	9.253	10	24.479	10	10.000	10	11.000	10	13.000	
	Persentase peningkatan sarana perkantoran yang dipelihara		5	6.500	5	9.253	5	9.500	5	10.000	5	11.000	5	13.000	
Program Pengawasan jasa konstruksi	Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi	100	0	-	100	94	100	9.500	100	113	100	125	100	137	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100	100	524	100	507	100	394	100	524	100	663	100	663	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	82	100	95	100	407	100	95	100	585	100	585	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program peningkatan displin aparat	Persentase disiplin aparat dalam berpakaian dinas	100	100	62	100	62	100		100		100		100	300	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	36	100	61	100	12	100	2	100	1	100	1	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	10	100	12	100	0,5	100	5	100	22	100	23	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	868	100	838	100	1.374	100	1.375	100	1.603	100	1.605	
	Persentase Peyenggaraan Perda dan Perkada yang ditegakan				19,47		18,00		17,00		16,00		15,00		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pen cegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas										100	285	100	285	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100	26	100	53	100	53	100	53	100	106	100	106	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan sistim keamanan di lingkungan masyarakat	100	100	159	100	68	100	15	100	15	100	105	100	110	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Wilayah Manajemen Kebakaran				44,44	1.549	55,55	1.743	55,56	1.743	66,67	4.484	66,67	4.484	
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	327	100	659	100	295	100	300	100	325	100	350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparat	100	100	452	100	180	100	725	100	700	100	675	100	700	
Program peningkatan displin aparat	Persentase disiplin aparat dalam berpakaian dinas	100	-	-	100	20	-	-	100	25	-	-	-	-	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	36	100	20	100	150	100	150	100	150	100	150	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	9	100	8	100	15	100	15	100	15	100	15	
Program Pencegahan Dini	Jumlah kelompok siaga bencana														
Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase penanganan bencana dalam masa tanggap darurat	100	100												
Program Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi	100	100	45	-	-	-	-	100	50	100	60	100	70	
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	327	100	659	100	295	100	300	100	325	100	350	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	452	100	180	100	725	100	700	100	675	100	700	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	36	100	20	100	150	100	150	100	150	100	150	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	9	100	8	100	15	100	15	100	15	100	15	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase terpenuhinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	373	100	289	100	487	100	325	100	365	100	420	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman Wawasan kebangsaan	80	80	396	80	617	80	925	85	800	90	900	90	1.000	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan	100	100	29	-	-	100	50	100	100	100	100	100	150	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	4.300	5.000	694	2.000	353	6.175	670	6.700	550	6.700	650	6.800	600	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	1	5	-	-	1	50	1	50	1	75	1	75	
Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	1	342	1	673	1	205	1	200	1	300	1	250	
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat	100	100	106	100	172	100	123	100	523	100	442	100	142	
URUSAN SOSIAL															Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	648	100	648	100	588	100	706	100	847	100	1.017	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	292	100	292	100	165	100	198	100	238	100	286	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	15	100	15	100	25	100	30	100	36	100	43	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	42	100	42	100	3	100	31	100	37	100	45	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan PMKS lainnya	Persentase pengetahuan dan keterampilan petugas jorong pendamping sosial fakir miskin, KAT dan PMKS	100	100	19	100	19	100	13	100	16	100	19	100	23	
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Tersfasilitasinya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	100	100	1.835	100	1.835	100	602	100	722	100	866	100	1.040	
Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kualitas pemberdayaan dan kelembagaan kesejahteraan sosial	100	100	571	100	571	100	377	100	453	100	543	100	652	
Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional masyarakat dan pemerintah kabupaten solok	100	100	63	100	63	100	24	100	29	100	34	100	41	
Program keluarga harapan	Persentase masyarakat miskin penerima program PKH	100	100	366	100	366	100	157	100	189	100	227	100	272	
Program Penataan peraturan perundang undangan	Persentase payung hukum dalam penanganan PMKS	100	100	98	100	98	100	-	100	129	100	155	100	186	
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN TENAGA KERJA															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	178	100	557	100	792	100	988	100	1.038	100	1.085	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	93	100	101	100	143	100	2.144	100	281	100	261	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	25	100	31	100	60	100	50	100	80	100	100	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	4	100	27	100	5	100	15	100	15	100	25	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kualitasnya		5	111	6	265	6	92	6	815	6	2.165	7	3.185	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase meningkatnya Kesempatan Kerja		3	36	5	287	7	685	9	1.368	10	1.715	12	1.670	
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Pemberian Perlindungan Hukum/Jamsostek				1	69	1	3	1	13	1	25	1	50	
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															DPPKB dan P3A
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase organisasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan	100	100	78	100	209	100	235	100	386	100	401	100	403	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase keterwakilan perempuan dalam kelembagaan	100	100	282	100	218	100	121	100	419	100	443	100	445	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	100	100	393	100	674	100	813	100	951	100	1.027	100	1.030	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penyelesaian kasus KDRT	100	100	182	100	151	100	152	100	237	100	252	100	253	
URUSAN PANGAN															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	278	100	333	100	596	100	557	100	608	100	608	Dinas Perikanan dan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	182	100	113	100	200	100	587	100	155	100	155	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program peningkatan displin aparaturn	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparaturn	-	-	-	-	-	-	-	100	30	100	33	100	33	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturn pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM	16,47	12,66	6	8	15	-	15,00	35	15,00	40	15,00			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	1 lap	5 lap	30	9 lap	40	9 lap	51	9 lap	58	9 lap	66	9 lap		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Fluktuasi harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen (coefisien variasi)	6,9	5,8		<10	2.845	<10	4.527	<10	4.830	<10	5.234	<10	5.234	
	Skor pola pangan harapan	80,1	81,1		82,3		82,5		83		84		84		
	Ketersediaan pangan	529,8	547,97		592,36		567,14		580,64		594,47		594,47		
	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		90		90		90		90		90		90		
	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	N/A	90		90	95	90	585	90	693	90	763	90	763	
URUSAN PERTANAHAN															Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penatausahaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah		10	3.570	10	5.871	10	4.407	10	4.141	10	4.475	10	4.199	
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP															Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	178	100	557	100	792	100	988	100	1.038	100	1.085	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturn dalam kondisi baik	100	100	93	100	101	100	143	100	2.144	100	281	100	261	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	25	100	31	100	60	100	50	100	80	100	100	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	4	100	27	100	5	100	15	100	15	100	25	
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang diawasi		30	231	32,5	300	35	330	37,5	360	40	400	42,5	430	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	Jumlah konservasi daerah tangkapan air dan sumber-		1	264	2	100	2	120	2	140	2	160	2	180	
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup		2	31	2	100	2	120	2	140	2	160	2	180	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah sampah yang tertangani		45	2503	65	3000	80	4500	90	5000	90	5200	90	5400	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.358	100	874	100	1.358	100	1.360	100	1.362	100	1.365	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	141	100	906	100	141	100	141	100	100	100	100	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	5	100	42	100	5	100	5	100	5	100	5	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	100	100	1.161	100	2.386	100	1.161	100	1.165	100	1.750	100	1.800	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	506	100	506	100	1.262	100	1.262	100	1.262	100	1.262	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	139	100	139	100	224	100	224	100	224	100	224	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program peningkatan displin aparat	Persentase disiplin aparat	100	100	-	100	-	100	-	100	25	100	25	100	25	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	88	100	88	100	-	100	82	100	82	100	82	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	74	100	74	100	79	100	46	100	46	100	46	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Pedesaan	Persentase Organisasi pemberdayaan	100	100	3.871	100	3.871	100	1.617	100	3.000	100	3.000	100	3.000	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan / Nagari	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Nagari	100	100	-	100	-	100	-	100	1.500	100	1.500	100	1.500	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Masyarakat	Persentase Partisipasi masyarakat dalam	100	100	224	100	224	100	205	100	500	100	500	100	500	
Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan	Persentase Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari	100	100	322	100	322	100	-	100	250	100	250	100	250	
Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Aset Nagari	Persentase Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Aset Nagari	100	100	-	100	-	100	201	100	300	100	300	100	300	
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															DPPKB dan P3A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	273	100	330	100	1.572	100	651	100	1.113	100	1.120	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparat	100	100	198	100	159	100	446	100	536	100	796	100	800	
Program peningkatan displin aparat	Persentase disiplin aparat	100	100	7	100	15	100	5	100	20	100	30	100	50	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	7	100	15	100	5	100	20	100	30	100	50	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	3	100	4	100	1	100	90	100	108	100	120	
Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif		100	1.363	100	1.550	100	2.261	100	1.271	100	1.381	100	1.390	
Program pelayanan Kontrasepsi	Persentase akseptor yang terlayani		100	235	100	243	100	56	100	325	100	335	100	350	
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR	Persentase Partispasi masyarakat		100	181	100	104	100	24	100	115	100	125	100	135	
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan ketahanan keluarga		-	-	100	36	100	38	100	38	100	41	100	42	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% PIK - KRR		100	270	100	227	100	346	100	346	100	384	100	384	
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah pendamping kelompok bina Keluarga		100	100	100	200	100	72	100	212	100	232	100	235	
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Pelaksanaan Konseling		100	965	100	290	100	1.104	100	1.211	100	1.219	100	1.220	
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase PIK RR yang mendapat sosialisasi		100	36	100	52	100	-	100	53	100	54	100	55	
URUSAN PERHUBUNGAN															Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	378	100	311	100	256	100	600	100	700	100	800	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	100	77	100	89	100	40	100	46	100	105	100	167	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	270	100	166	100	139	100	400	100	450	100	500	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	77	100	69	100	400	100	100	100	75	100	100	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	13	100	12	100	12	100	20	100	25	100	30	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai	5	1	160	0	136	0	34	1	5.000	1	1.000	1	1.000	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	60	63	692	66	1.150	69	731	72	1.000	75	1.200	78	1.400	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100	206	100	498	100	864	100	1.379	100	1.517	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100	100	100	181	100	4.525	100	549	100	604	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu				100	26	100	20	100	133	100	133	100	200	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu				100	11	100	13	100	68	100	68	100	14	
Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase Terlaksananya pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa				100	858	100	228	100	1.000	100	1.105	100	1.300	
Program pengelolaan infrastruktur Dasar dan Aplokasi E-Government	Persentase Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur dan aplikasi e-goverment						100	847	100	1.318	100	1.533	100	1.686	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
Program Faslitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase SDM dalam bidang komunikasi dan informasi									100	95	100	95	100	100	
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Pelaksanaan kerjasama informasi dan media massa						100	220	100	610	100	610	100	600		
Program e-government	Persentase penyelenggaraan dan pengembangan e-government								100	200	100	300	100	400		
Program Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase penyelenggaraan dan pengembangan e-Government								100	200	100	300	100	400		
Program pengembangan Smart City	Persentase ketersediaan pengembangan Smart City								100	1.200	100	1.200	100	1.200		
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	473	100	807	100	100	100	1.279	100	1.279	100	1.376		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	2.375	100	152	100	100	100	1.854	100	1.854	100	1.987		
Program peningkatan displin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas								100	50	100	50	100	60		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	20	100	18			100	50	100	50	100	55		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	35	100	44	100	100	100	35	100	35	100	40		

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang kelembagaannya meningkat		4	524			85	181	238	865	238	865	250	945	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang dibantu dalam penguatan kelembagaan		400	500	412	3.564	300	521	90	550	90	550	100	1.000	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat daya saingnya		200	367	339	1.065			70	150	70	150	100	250	
Program Penumbuhan Koperasi Sektor Riil	Jumlah koperasi sektor riil yang tumbuh				110	443			3	500	3	500	4	750	
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang mempunyai izin usaha		150	96	900	337	25	42	1.365	800	1.365	800	1.674	900	
URUSAN PENANAMAN MODAL															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan Jumlah Investasi		5	190	5	246	5	281	5	342	5	1.137	5	1.259	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor		5	161	6	374	7	78	8	100	9	492	10	495	
Program Penyiapan potensi Sumber Daya, sarana dan prasarana daerah	Perbup RUPM		2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Survey monitoring Perizinan		2.500	149	2.500	119	2.650	2	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Standar Manajemen Mutu	Sertifikasi Unit Kerja Pelayanan Publik		1	125	-	-	150	368	1	100	1	100	1	100	
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Terselenggaranya peningkatan Peran serta kepemudaan	100	100	676	100	819	100	713	100	832	100	1.095	100	1.204	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	persentase terselenggaranya pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100	100	520	100	960	100	314	100	505	100	1.237	100	1.353	
Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda	Persentase data potensi pemuda kader, Pemuda pelopor dan pemuda ke wirausahaan		-	-	-	-	-	-	100	50	100	50	100	50	
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pesentase Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		-	-	-	-	-	-	56	140	56	140	56	140	
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		-	-	-	-	-	-	100	112	100	117	100	117	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100	-	-	100	123	-	-	100	250	100	250	100	275	
URUSAN STATISTIK															Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan, Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase terpenuhinya data yang valid								100	250	100	250	100	275	
Program pengembangan statistik sektoral	Persentase peningkatan kualitas data								100	250	100	250	100	275	
URUSAN PERSANDIAN															Dinas Komunikasi dan Informatika
Program persandian dan keamanan informasi	Persentase pelaksanaan keamanan informasi									500	100	600	100	700	
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang TIK, persandian dan statistik	Persentase fasilitasi peningkatan SDM bidang TIK<persandian dan statistik									100	100	150	100	100	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Pelaksanaan kerjasama informasi dan media massa									840	100	1.000	100	1.200	
Program peningkatan akses dan kuantitas informasi publik	Persentase Peningkatan akses dan kuantitas informasi publik									1.000	100	1.000	100	1.200	
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pembangunan sistem administrasi elektronik									1.215	100	1.479	100	900	
URUSAN KEBUDAYAAN															Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya	100	100	599	100	1.544	100	1.267	100	650	100	715	100	786	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan nilai budaya	100	100	273	100	24		-	100	160	100	176	-	-	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	100	100	728	100	-		-	100	1.620	100	1.782	100	1.960	
URUSAN PERPUSTAKAAN															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	124	100	1.986	100	758	100	804	100	885	100	973	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	184	100	306	100	786	100	872	100	500	100	550	
Program peningkatan displin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	NA	NA	NA	100	6.765	100	25	100	30	100	35	100	35	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	74	100	44	100	90	100	87	100	97	100	97	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	3	100	25	100	30	100	30	100	30	100	30	
Program Pengembangan perpustakaan daerah	Persentase pengembangan perpustakaan daerah	100	100	641	100	680	100	791	100	900	100	1.080	100	1.300	
URUSAN KEARSIPAN															
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perbaikan sistem administrasi kearsipan								100	130	100	150	100	160	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip yang terselamatkan dan terlestarikan	100	100	204	100	325	100	910	100	1	100	975	100	990	
Program pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasana kearsipan yang terpelihara								100	150	100	160	100	200	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Peresentase peningkatan kwalitas pelayanan informasi kearsipan								100	120	100	130	100	140	
URUSAN PILIHAN															
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															Dinas Perikanan dan Pangan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	5,39	15,35	1.279	16,86	2.373	20	8.505	20,01	9.956	5	11.450	5	11.450	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	persentase peningkatan Produksi perikanan perairan umum	3,27	4,78	468	13,3	221	5,01	1.100	8,95	1.250	8,94	1.738	8,94	1.738	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun	31.2	32	948	33,4	1.950	34	2.312	35	2.300	36	2.484	36	2.484	
URUSAN PARIWISATA															Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	523	100	648	100	1.223	100	1.659	100	1.659	100	1.825	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	832	100	276	100	296	100	480	100	480	100	528	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	15	100	17	100	9	100	50	100	50	100	55	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	3	100	60	100	17	100	100	100	110	100	110	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase destinasi yang dikembangkan		3,4	2.410	20,8	8.384	24,2	1.686	20,5	8.242	14,6	8.242	12,5	9.067	
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	% akumulasi pertumbuhan industri pariwisata		10	342	25	628	50	282	70	1.280	85	1.280	100	1.408	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pameran dan event promosi yang dilaksanakan		5/11	2.586	5/11	2.295	5/11	1.043	5/11	2.900	5/11	2.900	5/11	3.190	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah lokasi RTH yang dikembangkan		15	646		-		-		-		-			
URUSAN PERTANIAN															Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	304	100	813	100	140	100	1.844	100	1.936	100	2.033	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	291	100	219	100	415	100	1.170	100	1.229	100	1.290	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	300	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	12	100	21	-	-	100	75	100	75	100	75	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	36	100	110	100	61	100	75	100	236	9	243	
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian			4.156		3.604		1.399		5.370		5.781		6.186	
	- Padi Organik	4	4		3		3		3		3		3		
	- Padi Non Organik	5	5		5		3		3		3		3		
	-Bawang Merah	(2)	3		40		5		5		5		5		
	-Kopi	(21)	(21)		(11)		3		3		3		3		
	-Cengkeh	21,20	(15)		(9)		4		5		6		7		
	-Kakao	1	18		0		6		8		10		11		
	-Karet	14	5		2		4		5		6		7		
	-Kentang	1,93	(16,00)		(31,00)		3		3,40		3,60		3,70		
	Produktifitas Padi	6	6		6		6		6		6		6		
	Cakupan kelompok tani penerima pupuk bersubsidi	845,0	847,0		873,0		917,0		963,0		1.011,0		1.062,0		
	Pemanfaatan lahan terlantar dan kritis	-		-			25		100		100		100		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Persentase Luas Pertanaman padi sawah Yang Menggunakan benih unggul bersertifikat	36	40	2.312	49	4.243	57	6.056	59	4.318	62	3.149	65	3.417	
	Penambahan cakupan areal sawah beririgasi melalui pengembangan / rehabilitasi / pembangunan sarana dan prasarana sumber air	12.220,70	-		1.335,00		960,00		#####		1.000,00		1.000,00		
	Panjang Jalan Usaha tani yang Dibangun/dipelihara	24,00	2,80		42,60		40,00		4,00		4,00		4,00		
	Panjang Jalan produksi yang Dibangun/dipelihara	-	4		2		2		1		1		1		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pengendalian kasus penyakit ternak	10	10	-	10	437	10	115	10	1.357	10	959	10	1.012	
	Persentase penurunan kasus gistian hewan pembawa rabies	5	5		5		5		5		5		5		
Program Peningkatan Produksi Hasil PETERNAKAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Ternak	3	5	-	-	5	1.927	3	1.286	3	3.228	3	3.925	3	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	Jumlah populasi ternak sapi	38.268	39.592		37.768		38.901	-	40.068		42.071		44.175		
	Jumlah populasi ternak unggas	NA	2.487	-	3.019		3.110		3.203		3.299		3.398		
	Cakupan kelompok tani penerima bantuan ternak / bibit	115	110		14		14		14		14		14		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Persentase Pertambahan Kelompok Tani Yang Menggunakan Teknologi Pertanian	4	41	1.245	188	3.366	4	-	4	1.282		1.198	4	1.239	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penambahan Kelompok Tani Yang Telah Melakukan Agribisnis	4	5	540	5	1.513	5,00	725	5	3.248	5	3.189	5	3.689	
	Jumlah kelompok tani yang menerapkan standarisasi produk	2,00	4,00		2,00		-			-	2,00	-	2,00		
	Cakupan kelompok usaha agribisnis yang dikembangkan	-	-		-		-		1		1		1		
	Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan Sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil	9	8		9		1		1		1		1		
	Indeks NTP per komoditi		NA		105		106		107		108		109		
	Indeks NTP per komoditi		NA		105		106		107		108		109		
	Indeks NTP per komoditi		NA		99		100		101		102		103		
	Indeks NTP per komoditi		NA		102		103		104		105		106		
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	5	114	5	1.248	5	564	5	1.961	5	2.394	5	2.577	
	Jumlah balai penyuluh pertanian yang menjadi pusat alih tekhnologi pada kawasan pertumbuhan ekonomi	2	4		4		5		14		14		14		

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	Persentase penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan dan hasil deminasi penelitian tekhnologi pertanian oleh perguruan tinggi/lembaga/balai penelitian	30	30		30		30		30		30		30		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Pameran/promosi dan Perlombaan Hasil Pertanian yang diadakan/ diikuti	10	10	93	9	444	10	1.780	10	525	10	1.693	10	658	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Pameran/promosi dan Perlombaan Hasil Peternakan yang diadakan/ diikuti	2	2	-	2	-	2	68	2	282	2	250	2	250	
FUNGSI PERENCANAAN															Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	395	100	1.140	100	1.838	100	1.930	100	2.026	100	2.128	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	794	100	273	100	552	100	580	100	609	100	639	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	13	100	173									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	18	100	50	100	28	100	29	100	31	100	32	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program peningkatan fasilitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terfasilitasinya penyusunan dokumen dan publikasi perencanaan	100	100	185	100	237	100	175	100	184	100	193	100	203	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelenggaraan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah	100	100	1.441	100	1.725	100	1.537	100	1.614	100	1.695	100	1.779	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kajian dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dilaksanakan	100	100	927	100	973	100	272	100	286	100	300	100	315	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase kajian dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang dilaksanakan	100	100	908	100	1.049	100	620	100	651	100	684	100	718	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kajian dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	100	1.091	100	1.615	100	480	100	504	100	529	100	556	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase terfasilitasinya penyusunan dokumen dan publikasi perencanaan	-					48 berita	32	48 berita	34	48 berita	35	48 berita	37	
FUNGSI KEUANGAN															Badan Keuangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	606	100	719	100	2.181	100	11.034	100	1.137	100	1.251	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	981	100	246	100	634	100	574	100	631	100	694	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	242	100	187	100	25	100	608	100	668	100	735	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	69	100	182	100	108	100	167	100	184	100	202	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah tepat waktu		89	6.620		8.845	100	3.635	100	11.314	100	11.950	100	13.145	
FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	285	100	298	100	745	100	380	100	417	100	460	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	289	100	193	100	178	100	168	100	185	100	204	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	40	100	52	100	14	100	92	100	101	100	111	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	8	100	24	100	1	100	14	100	16	100	17	
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3	3	104	3	218	3	47	4	230	4	252	4	278	
Program Pendidikan Kedinasan	Indeks Profesionalitas ASN	83	84	855	85	2.018	85	-	86	2.910	86	3.201	87	3.522	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	83	84	148	85	248	85	718	86	419	86	461	87	506	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	83	84	1.200	85	1.562	85	484	86	1.495	86	1.644	87	1.222	
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase hasil litbang yang terpakai dalam kebijakan										80	250	85	250	
FUNGSI LAINNYA															Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	7.122	100	8.430	100	8.998	100		100	8.998	100	8.998	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	8.528	100	8.252	100	8.381	100		100	8.381	100	8.381	
Program peningkatan displin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	100	227	100	377	100	362	100		100	362	100	362	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	253	100	194	100	16	100		100	16	100	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	51	100	51	100	3	100		100	3	100	3	
Program peningkatan nilai-nilai agama dan kebudayaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan lembaga agama dan budaya			6.428		6.690		4.452				4.452		4.452	
Program pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah	Persentase peningkatan skala usaha UMKM			429		429		72				72		72	
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase peningkatan nilai investasi			252		252		17				17		17	
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat														
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIPnya			657		787		202				202		202	
Program peningkatan pelayanan pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintahan umum	90	90	761	90	1.963	90	1.700	90	1.700	90	1.700	90	1.700	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penurunan temuan BPK dalam pengelolaan keuangan OPD	5	5	1.013	5	1.178	5	459	5		5	459	5	459	
Program penyusunan SPM dan SOP	Persentase OPD yang mempunyai SOP														
Program penataan peraturan perundang undangan	Persentase terpenuhinya kualitas produk hukum daerah	100	100	893	100	943	100	406			100	406	100	406	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dokumen perencanaan			96		190		64				64		64	
Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dikelola dengan baik			1.862		2.388		263				263		263	
Program kerjasama pembangunan	Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik			487		546		176				176		176	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan			235		200									
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM														
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Persentase Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Aset Nagari														
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pembangunan sistem administrasi elektronik														
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Pelaksanaan kerjasama informasi dan media massa			3.158		3.389		2.716				2.716		2.716	
Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa				439		393		148				148		148	
Program penataan organisasi pelayanan publik								25				25		25	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	857	100	857	100	1.074	100	2.960	100	2.363	100	2.600	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	366	100	366	100	174	100	175	100	384	100	422	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	78	100	78	100	4	100	7	100	8	100	9	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIPnya	1.771	100	2.140	100	2.140	100	146	100	295	100	323	100	355	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% Auditor/ P2UPD yang Memiliki Sertifikasi Teknis Pengawasan	212	100	365	100	365	100	-	100	365	100	401	100	442	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.764	100	3.018	100	3.466	100	3.500	100	3.500	100	3.500	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	2.325	100	1.841	100	2.326	100	3.796	100	2.637	100	3.135	
Program peningkatan displin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	100	263	100	283	100	500	100	500	100	500	100	407	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100	100	198	100	188	100	302	100	350	100	350	100	350	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	66	100	56	100	90	100	90	100	90	100	90	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	100	25	100	23	100	35	100	37	100	37	100	37	
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100	100	269	100	371	100	653	100	653	100	653	100	653	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan X Koto Singkarak

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	195	100	196	100	197	100	198	100	199	100	200	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	93	100	94	100	95	100	96	100	97	100	98	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	4	100	5	100	5	100	5	100	6	100	6	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	316	100	318	100	320	100	322	100	324	100	326	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	77	100	78	100	79	100	80	100	81	100	82	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas		100	10	100	11	100	12	100	13	100	14	100	15	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	9	81	10	82	10	83	11	84	12	85	13	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	3	100	4	100	5	100	5	100	6	100	6	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan X Koto Datas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	144	100	145	100	146	100	147	100	148	100	150	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	41	100	42	100	43	100	44	100	45	100	46	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	4	100	5	100	19	100	5	100	6	100	6	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	377	100	378	100	379	100	380	100	381	100	382	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	118	100	119	100	120	100	121	100	122	100	123	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas	NA	100	10	100	11	100	12	100	13	100	14	100	15	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	7	81	8	82	8	83	8	84	9	85	10	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	7	100	7	100	8	100	8	100	9	100	9	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Junjung Sirih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	111	100	130	100	143	100	157	100	173	100	191	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	19	100	21	100	23	100	26	100	28	100	31	
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	100	99	100	182	100	199	100	218	100	239	100	262	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan konerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100,00	100,00	40	100,00	47	100	52	100,00	57	100,00	63	100,00	69	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas yang tertangani		90	15	92	16	94	18	96	20	98	22	100	24	
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	Persentase organisasi masyarakat dan UMKM yang diberdayakan	100	100	12	100	13	100	14	100	15	100	16	100	17	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	20	100	22	100	24	100	26	100	29	100	31	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	22	100	24	100	26	100	29	100	32	100	35	
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pencapaian target PAD	NA	80	6	81	7	82	9	83	9	84	10	85	11	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	169	100	171	100	173	100	176	100	178	100	180	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	63	100	65	100	67	100	69	100	71	100	73	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	6	100	7	100	8	100	8	100	9	100	9	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	315	100	319	100	321	100	324	100	327	100	330	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	12	100	14	100	14	100	15	100	15	100	16	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	5	81	6	82	7	83	7	84	8	85	8	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas	NA	100	8	100	9	100	9	100	9	100	10	100	10	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Bukit Sundi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100	89	100	224	100	247	100	271	100	299	100	326	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100	152	100	157	100	175	100	190	100	209	100	280	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100	6	100	7	100	8	100	9	100	10	100	11	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan pengawasan ebijakan KDH		100	110	100	114	100	126	100	138	100	152	100	167	
Program Peningkatan SDM dan kelembagaan nagari	Persentase SDM pemerintahan nagari yang ditingkatkan				100	38	100	42	100	46	100	51	100	56	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan		100	176	100	78	100	86	100	94	100	104	100	114	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang sesuai aturan		100	9	100	12	100	13	100	15	100	16	100	18	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas		100		100	24	100	26	100	29	100	32	100	35	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100		100	24	100	26	100	29	100	32	100	35	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Kubung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	261	100	265	100	269	100	269	100	272	100	274	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	85	100	88	100	91	100	91	100	94	100	96	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	6	100	7	100	8	100	8	100	9	100	9	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	234	100	236	100	238	100	240	100	242	100	244	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	52	100	53	100	54	100	54	100	55	100	56	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	9	81	10	82	11	83	11	84	12	85	13	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas	NA	100	18	100	20	100	22	100	22	100	23	100	24	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Gunung Talang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	195	100	198	100	201	100	204	100	206	100	208	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	116	100	118	100	120	100	122	100	124	100	126	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	3	100	4	100	5	100	5	100	6	100	6	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	374	100	376	100	378	100	380	100	382	100	384	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	8	100	10	100	10	100	12	100	12	100	14	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	16	81	18	82	20	83	22	84	22	85	24	
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kanrantibmas	NA	100	10	100	12	100	12	100	14	100	14	100	15	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	4	100	4	100	5	100	5	100	6	100	6	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Payung Sekaki
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	170	100	107	100	109	100	176	100	178	100	180	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	114	100	116	100	118	100	120	100	122	100	124	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	2	100	2	100	2	100	2	100	3	100	4	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	315	100	319	100	321	100	324	100	327	100	330	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	36	100	38	100	40	100	42	100	44	100	46	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	2	81	2	82	2	83	2	84	2	85	2	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas	NA	100	6	100	5	100	6	100	7	100	7	100	8	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Tigo Lurah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	258	100	259	100	260	100	261	100	262	100	263	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	123	100	124	100	125	100	126	100	127	100	128	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	5	100	6	100	7	100	7	100	8	100	8	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	209	100	210	100	211	100	212	100	213	100	214	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	15	100	16	100	17	100	17	100	18	100	18	
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	11	100	12	100	13	100	13	100	14	100	14	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas		100	15	100	16	100	17	100	17	100	18	100	18	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	9	81	10	82	10	83	11	84	12	85	13	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Lembang Jaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	201	100	203	100	205	100	207	100	209	100	211	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	163	100	179	100	197	100	217	100	239	100	263	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan pengawasan ebijakan KDH	100	100	5	100	5	100	6	100	7	100	7	100	8	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100,00	100,00	5	100,00	5	100	6	100,00	6	100,00	7	100,00	8	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	NA	NA	NA	100	7	100	8	100	8	100	9	100	10	
	Persentase kegiatan keagamaan, adat dan kebersihan yang terfasilitasi	100	100	102	100	112	100	123	100	136	100	149	100	164	
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	Persentase pembinaan terhadap nagari				100	10	100	11	100	12	100	13	100	14	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas		100	8	100	8	100	9	100	10	100	11	100	12	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan				100	8	100	9	100	10	100	11	100	12	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang sesuai aturan	100	100	7	100	8	100	9	100	9	100	10	100	12	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Danau Kembar	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	187	100	188	100	189	100	190	100	190	100	191		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	79	100	80	100	81	100	81	100	82	100	82		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100	100	9	100	10	100	11	100	11	100	12	100	12	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan		100	100	252	100	253	100	254	100	254	100	255	100	255	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	46	100	47	100	48	100	48	100	49	100	50		
Program Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	100	100	5	100	5	100	6	100	6	100	7	100	7		
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kanrantibmas	NA	100	5	100	5	100	6	100	6	100	7	100	8		
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	13	81	13	82	14	83	14	84	15	85	16		
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Lembah Gumanti	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	170	100	172	100	251	100	176	100	178	100	180		

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	40	100	42	100	44	100	46	100	48	100	50	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	4	100	4	100	4	100	5	100	5	100	6	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	315	100	319	100	321	100	324	100	327	100	330	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	14	100	16	100	18	100	20	100	22	100	24	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	7	81	8	82	9	83	10	84	11	85	12	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas	NA	100	10	100	12	100	14	100	16	100	18	100	20	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Hiliran Gumanti
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	154	100	155	100	156	100	157	100	158	100	159	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	114	100	115	100	116	100	116	100	117	100	117	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	9	100	10	100	11	100	11	100	12	100	12	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	100	100	283	100	283	100	284	100	284	100	285	100	285	

--	--

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROIRITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN (dalam juta)										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	100	100	7	100	8	100	8	100	8	100	9	100	9	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terpeliharanya kantrantibmas		100	10	100	11	100	12	100	13	100	14	100	15	
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase pencapaian target PAD	80	80	8	81	10	82	10	83	10	84	11	85	12	
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA															Kecamatan Pantai Cermin
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00	100	170	100	172	100	174	100	176	100	178	100	180	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	79	100	80	100	81	100	82	100	83	100	85	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	4	100	4	100	4	100	5	100	5	100	6	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
MISI 1 : Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun								
Tujuan : Mewujudkan pendidikan ke jejnajng yang lebih tinggi								
Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan								
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,58	7,59	7,6	7,61	7,62	7,63
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	- PAUD	%	76,85	78,48	78,71	80,00	81,71	86,71
	- SD/MI/Paket A	%	111,79	112,63	114,65	114,93	115,22	115,50
	- SMP/MTSN/Paket B	%	84,00	85,53	86,64	87,75	88,89	90,00
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan								
3	Nilai rata-rata ujian							
	- SD/MI	Nilai	70,58	71,75	72,56	73,38	74,19	75,00
	- SMP/MTSN/Paket B	Nilai	49,97	48,60	49,77	51,37	52,97	55,00
MISI 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat								
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat								
Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat								
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,7	67,9	68,1	68,3	68,5	68,7
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas penduduk								
5	Total Fertiliy Rate (TFR)	Indek	2,72	2,70	2,68	2,66	2,63	2,60
6	Indeks Pembangunan Gender	Indek	95,73	95,74	95,75	95,76	95,77	95,78
7	Pertumbuhan penduduk	%	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan								
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman								
8	Indeks kualitas lingkungan	Indek	NA	NA	60	61	62	63

--	--

No	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	hidup							
MISI 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai								
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat								
Sasaran : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor unggulan								
9	Pertumbuhan ekonomi	%	5,45	5,46	5,47	5,48	5,49	5,5
10	PDRB perkapita	Jt/Th	30,2	32,4	34,4	36,6	38,9	41,3
11	Indeks Gini	Indek	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
12	Angka kemiskinan	%	9,75	9,5	9,25	9	8,75	8,5
13	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3
14	Nilai investasi	Milyar	180	189	198,45	208,37	218,79	229,73
15	PDRB sektor pertanian	Milyar	3,234	3.364	3.494	3.628	3.768	3.913
16	PDRB sektor Akomodasi dan makan-minum	Milyar	62	68	72	76	80	85
Sasaran 2 : Meningkatkan ketahanan pangan								
17	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	608,65
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitasinsfrastruktur di Kawasan Pertumbuhan ekonomi								
18	Persentase insfrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi	%	35	40	45	50	55	60
MISI 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.								
Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama, adat dan budaya								
Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai- nilai agama. Adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat								
19	Indeks Nagari Madani	Indeks	NA	NA	0,55	0,60	0,65	0,75
20	Angka kriminalitas	Angka	614	583	554	526	500	475
MISI 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)								
Tujuam : Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik								
Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan tranparansi penyelenggaraan pemerintahan								
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	Indek	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
22	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	C	CC	CC	B	B	B
23	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	CC	B	B	BB	BB	BB
24	Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level	NA	NA	1,5	2,3	3,5	4
Sasaran 2 : Meningkatkan tata keloladan kemandirian keuangan daerah								
25	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

--	--

Penetapan indikator kinerja daerah harus berdasarkan asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yakni :

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2. Aspek Pelayanan Umum;
- 3. Aspek Daya Saing Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode (2015)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian							
1	Pertumbuhan ekonomi	5,43	5,45	5,46	5,47	5,48	5,49	5,5
2	PDRB perkapita (ADHB)	24,97	30,2	32,4	34,4	36,6	38,9	41,3
3	Angka kemiskinan	10	9,75	9,5	9,25	9	8,75	8,5
4	Indeks Gini	0,29	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,53	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,12	67,67	67,86	68,05	68,24	68,43	68,62
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,57	7,58	7,59	7,6	7,61	7,62	7,63
2	Harapan Lama Sekolah	12,88	13	13,12	13,25	13,38	13,5	13,62
3	APK PAUD	81,31	76,85	78,48	78,71	80,00	81,71	86,71

--	--

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode (2015)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	APK SD/MI	118,68	111,79	112,63	114,65	114,93	115,22	115,50
5	APK SMP/MTs/Paket B	99,56	84,00	85,53	86,64	87,75	88,89	90,00
6	APM SD/MI/Paket A	NA	NA	NA	96,09	96,56	97,03	97,50
7	APM SMP/MTs/Paket B	NA	NA	NA	71,54	75,61	79,68	83,75
8	Tingkat kelulusan SD/MI	99	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat Kelulusan SMP/ MTs	99	100	100	100	100	100	100
10	Nilai rata-rata ujian SD	69,41	70,58	71,75	72,56	73,38	74,19	75,00
11	Nilai rata-rata ujian SMP	51,14	49,97	48,60	49,77	51,37	52,97	55,00
12	Persentase Sekolah yang terakreditasi A (SD/MI)	55	60	65	70	85	90	95
13	Persentase Sekolah yang terakreditasi A (SMP/MTs)	44	49	54	59	64	69	74
14	Persentase penerapan SUBP SD	NA	NA	NA	24	45	66	87
15	Persentase penerapan SUBP SMP	NA	NA	24	45	66	87	90
	Kesehatan							
1	Usia Harapan Hidup	67,5	67,7	67,9	68,1	68,3	68,5	68,7
2	Angka Kematian Ibu	0,00108	0,001723	0,00057	0	0	0	0
3	Angka kematian bayi	16,47	13,63	12,17	10,7	9,24	7,77	6,31
4	Persentase balita gizi buruk	0,0245	0,039	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi	30	35	40	45	50	55	60
2	Persentase Jalan mantap	59,17	60,47	63,17	64,47	65,77	67,07	68,37
3	Persentase jembatan mantap	66,20	69,00	72,80	74,70	76,60	78,50	80,40
4	Persentase irigasi kondisi baik	47,77	53,07	58,07	63,07	68,07	73,07	78,07
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Cakupan rumah Tangga dengan Air Minum yang layak	64,42	68,4	70,25	72,4	73,25	74	75
2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi yang layak	67,54	68,4	70,4	71,35	73,5	74,3	75
3	Persentase kawasan perumahan dan lingkungan yang tertata	15	18	21	25	30	35	40
	Sosial							
1	Persentase Penurunan PMKS	35	40	45	50	55	60	65
	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR							
	Tenaga Kerja							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,53	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Indeks Pembangunan Gender	95,73	95,74095	95,7519	95,76285	95,7738	95,78475	95,7957
2	Rasio KDRT	0,01212	0,012	0,01175	0,01150	0,01125	0,011	0,01095

--	--

No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode (2015)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pangan							
1	Ketersediaan pangan utama	536,37	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	608,65
2	Skor PPH	80,01	81,5	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00
	Lingkungan Hidup							
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	NA	NA	NA	60	61	62	63
	Pengendalian Penduduk dan KB							
1	Total Fertiliy Rate (TFR)	2,74	2,72	2,70	35	2,66	2,63	2,60
2	Pertumbuhan penduduk	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	Komunikasi dan Informatika							
1	Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	NA	1,5	2,3	3,5	4
	Penanaman Modal							
1	Nilai investasi	NA	180	189	198,45	208,37	218,79	229,73
	Kebudayaan							
1	Jumlah lembaga adat (KAN) yang aktif	100	100	100	100	100	100	100
	Pariwisata							
1	PDRB sektor Akomodasi dan makan minum	57	62	68	72	76	80	85
	FUNGSI PENUNJANG							
	Keuangan							
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	persentase PAD terhadap pendapatan daerah	4,32	4,4	4,48	4,56	4,64	4,72	4,9
	Fungsi lainnya							
1	Nilai Reformasi Birokrasi	D	C	CC	CC	B	B	B
2	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	B	B	B	B	BB
3	Nilai Maturitas SPIP	NA	2,0	3,0	3,3	3,6	3,8	4,0
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	3,10	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

--	--

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan dokumen strategis sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN.

Sebagai tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja daerah, maka diperlukan peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pembangunan memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok, pihak swasta, aparaturnya pemerintah daerah Kabupaten Solok, dukungan DPRD Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Dengan kepedulian dan dukungan semua pihak, Kabupaten Solok akan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali pemerintah Kabupaten Solok, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Solok untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaan.

